



EKONOMI
KREATIF
KALIMANTAN
TIMUR

DINAS PRIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



RENJA TAHUN 2026

JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.22 TLP. (0541) 736 850
SAMARINDA

Planner 2026



pesona
indonesia



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 - b. bahwa telah ada hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 melalui surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800.8.2.6/3548/Bangda Tanggal 25 Juni 2025;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 terdiri atas:

BAB I. Pendahuluan;
 BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
 BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 BAB VIII. Penutup.

- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 selanjutnya menjadi:

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- b. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026; dan
- c. acuan bagi Kabupaten/Kota di Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi penambahan sub kegiatan baru pada KUA serta PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.
- (2) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah atau keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Agustus 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 42.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan YME yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya untuk kita semua sehingga tersusunnya dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

Rencana Kerja merupakan suatu penjabaran perencanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam satu tahun dan merupakan hasil penjaringan dan pembahasan rencana program dan kegiatan sesuai atau berdasarkan aspirasi program dan kegiatan per seksi pada bidang pada satuan kerja Dinas Pariwisata tanpa melupakan aspirasi masyarakat.

Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur ini diharapkan dapat mengakomodir aspirasi kegiatan pembangunan Pariwisata yang akan dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2026 yang merupakan pelaksanaan pada tahun Pertama RPJMD 2026 - 2029

Samarinda, 18 Agustus 2025

Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Kalimantan Timur



Ririn Sari Dewi, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197304171999032007

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	11
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	27
3.3 Program dan Kegiatan	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	48
BAB V PENUTUP	
	50

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur	6
TABEL 2.2	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur	10
TABEL 2.3	
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur	15
TABEL 2.4	
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur	18
TABEL 3.1	
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan	32
TABEL 4.1	
Rencana Kerja dan Pendanaan	48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Program dan Kegiatan Tahun 2026 berdasarkan indikator dan target serta uraian penjelasan kegiatan.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pariwisata Kalimantan Timur

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur telah memasuki tahun pertama dari rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025 – 2029. Pada periode ini, pembangunan Pariwisata Kalimantan Timur dapat lebih didalami terhadap program kegiatan yang telah dilakukan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Tahun 2026 Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 Provinsi Kalimantan Timur serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, tahun 2026 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD. Hasil pembahasan forum PD dan dinamika pembangunan serta serangkaian hasil Rapat Kerja (Raker) Gubernur dengan Bupati/Walikota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/Instansi Vertikal dan SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Timur.

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2026 ini akan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Tahun 2025 acara ini melibatkan seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah, swasta dan masyarakat yang berasal dari Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya berdasarkan aspirasi yang berkembang dirumuskan dalam kesepakatan yang menjadi bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur ini disusun berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dan akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon serta Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan renacana kerja pemerintah daerah;
3. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur;
5. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
6. Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029;
7. Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Talanpekda) Provinsi Kalimantan Timur Periode 2021-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 ini dimaksudkan agar program dan kegiatan tahun 2026 selaras dengan Program Strategis Nasional Kementerian Pariwisata, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025, Perubahan Rencana Strategis SKPD (RENSTRA PD) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta Program dan Kegiatan PD Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan dari Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD (RENJA PD) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah

untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 5 Program, 14 Kegiatan, 40 Sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp 82.946.424.560 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 78.672.436.320 dengan persentase capaian sebesar 94,85%.

Capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Realisasi keuangan Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.184.467.244 (dua puluh dua milyar seratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) atau 88,99% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.743.721.117 (dua milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh belas rupiah) dari total anggaran Rp. 24.928.188.361 (dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

2. Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata

Realisasi keuangan Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.969.561.427 (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) atau 91,96% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 872.170.349 (delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah)

dari total anggaran Rp. 10.841.731.776 (sepuluh milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

3. Program Pemasaran Pariwisata

Realisasi keuangan Program Pemasaran Pariwisata dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.314.241.422 (sepuluh milyar tiga ratus empat belas juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) atau 95,04% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 538.601.379 (lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dari total anggaran Rp.10.852.842.801 (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus satu rupiah).

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Realisasi keuangan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.225.870.458 (dua puluh delapan milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) atau 99,92% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 74.216.794 (tujuh puluh empat juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dari total anggaran Rp.28.300.081.252 (dua puluh delapan milyar tiga ratus juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Realisasi Keuangan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.978.295.769 (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima puluh enam puluh sembilan rupiah) atau 99,44% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 45.251.601 (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus satu rupiah) dari total anggaran Rp.8.023.574.370 (delapan milyar dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Dari penjelasan diatas hasil pencapaian kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.
Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan PD dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD th 2025) (n-1)*	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th (berjalan)	
			Target RENSTRA PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan : Pilihan							
	Bidang Urusan : Pariwisata							
26.02	Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	30	30	100%	-	-	100%
26.02.1.01	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Daya Tarik yang Dikelola	33,33	33,33	100%	-	-	100%
26.02.1.01.02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	100%	2 Lokasi	2 Lokasi	100%
26.02.1.02	Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	2 Produk Wisata	2 Produk Wisata	100%	2 Produk Wisata	2 Produk Wisata	100%
26.02.1.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
26.02.1.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
26.02.1.03	Kegiatan: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola Produk Wisatanya	3 Destinasi Pariwisata	3 Destinasi Pariwisata	100%	3 Destinasi Pariwisata	3 Destinasi Pariwisata	100%
26.02.1.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
26.02.1.03.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
26.02.1.04	Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar	Jumlah Usaha Pariwisata yang	15 Usaha Pariwisata	15 Usaha Pariwisata	100%	15 Usaha Pariwisata	15 Usaha Pariwisata	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan PD dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD th 2025) (n- 1)*	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th (berjalan)	
			Target RENSTRA PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	dibina						
26.02.1.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
26.02.1.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	100%	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	100%
					100%			100%
26.03	Program : Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan - Wisatawan Nusantara Wisatawan Mancanegara	2 Juta 310 Ribu	6.295.708 16.507	363%	6 Juta 15.5 Ribu	2.000.000 5.000	363%
26.03.1.01	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	- Jumlah Jangkauan Pemasaran Produk Wisata Kaltim	6 Daerah/Kota	6 Daerah/Kota	100%	Daerah/Kota 6	Daerah/Kota 6	100%
26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dlaam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata, Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
26.03.1.01.03	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
26.05	Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentase Tercapainya Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi	97 %	137 %	141%	141%	100%	100%
26.05.1.01	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina	9 Kegiatan	12 Kegiatan	133%	9 Kegiatan	9 Kegiatan	133%
		Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	700 Orang	980 Orang	140%	700 Orang	700 Orang	140%
26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	40 Orang	40 Orang	100%	40 Orang	40 Orang	100%
26.05.1.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	15 Orang	75 Orang	500%	200 Orang	120 Orang	100%
26.05.1.01.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Berbasis	70 Orang	70 Orang	100%	70 Orang	30 Orang	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan PD dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD th 2025) (n- 1)*	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th (berjalan)	
			Target RENSTRA PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Tingkat Lanjutan	Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (<i>Tour Guide</i>) Tingkat Lanjutan						
26.05.1.01.08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
26.05.1.01.09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	710 Orang	710 Orang	100%	710 Orang	530 Orang	100%
26.04	Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Presentase Sub Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	23,53 %	23,53 %	100%	23,53 %	23,53 %	100%
26.04.1.01	Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Kota Kreatif yang Dikembangkan	3 Kota Kreatif	3 Kota Kreatif	100%	3 Kota Kreatif	3 Kota Kreatif	100%
26.04.1.01.01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	1 Sarpras	100%
26.04.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	8 Laporan	8 Laporan	100%	8 Laporan	5 Kegiatan	100%
26.04.1.02	Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Jenis Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	3 Jenis Ekosistem	3 Jenis Ekosistem	100%	3 Jenis Ekosistem	3 Jenis Ekosistem	100%
26.04.1.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Haki	100%
26.04.1.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	5 Monev	100%
3.26.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pariwisata	95%	95%	100%	95%	95%	100%
3.26.01.1.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen perencanaan dan anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
26.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang diadakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
26.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
26.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji, Tunjangan dan Jasa Administrasi Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Gaji dan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan PD dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD th 2025) (n-1)*	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th (berjalan)	
			Target RENSTRA PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Tunjangan ASN						
26.01.1.02.02	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	100 Kali	100 Kali	100%	100 Kali	100 Kali	100%
26.01.1.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
26.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas ata Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan biayanya	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan Pariwisata Kalimantan Timur yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan Visi dan Misinya yang diharapkan mampu mewujudkan daerah tujuan pariwisata Kalimantan Timur sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing, dapat meningkatkan industri pariwisata Kalimantan Timur sebagai penopang perekonomian daerah selain kekayaan sumber daya alamnya, mampu meningkatkan seni dan budaya daerah untuk selalu dipelihara dan dilestarikan sebagai karakter jati diri dan pemersatu bangsa, serta dapat meningkatkan penyelenggaraan pariwisata yang profesional dan akuntabel sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Visi Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran strategis dan 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) kegiatan yang diukur dengan 2 (dua) indikator utama.

Perihal tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata
Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Peningkatan Jumlah Pergerakan Wisatawan [Orang]	-	-	6.918.000	7.238.000	7.620.000	9.437.981	1.293.838	7.238.000	7.620.000	Dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan adalah dengan meningkatkan inovasi produk, kekuatan pemasaran, peningkatan sarpras destinasi pariwisata (aksesibilitas dan konektifitas), pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dan sinergitas antar pelaku wisata
	a. Jumlah Kunjungan Wisatawan nusantara (wisnus) [Orang]	-	-	6.900.000	7.219.000	7.600.000	9.382.976	1.287.907	7.219.000	7.600.000	
	b. Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara (wisman) [Orang]	-	-	18.000	19.000	20.400	55.005	5.931	19.000	20.400	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah										
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	-	70	72	75	66	-	72	75	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	-	-	88,20	88,30	88,40	83,5	-	88,30	88,40	

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian realisasi untuk jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara terealisasi sebanyak 9.382.976 orang dari target kinerja tahun 2024 sebesar 6.918.000 orang atau dengan capaian 136,43%. Capaian indikator jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara telah tercapai dan melebihi target hal ini terjadi karena beberapa event nasional maupun internasional yang diadakan di Kalimantan Timur.

Sementara untuk target nilai akuntabilitas kinerja PD tidak tercapai targetnya karena tidak sesuai format dokumen yang dibutuhkan dengan dokumen yang dibuat. Serta nilai indeks kepuasan masyarakat perangkat

daerah tidak mencapai target dikarenakan kekurangan responden dalam pengisian Survei Kepuasan Masyarakat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa poin sebagai isu strategis pengembangan Kepariwisata dan ekonomi kreatif Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Penetapan IKN menjadi peluang besar bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.

Dinamika ini mendorong pertumbuhan pesat pada pelaku usaha pariwisata yang kini semakin beragam dan inovatif. Bersamaan dengan itu, sektor ekonomi kreatif pun tak kalah menunjukkan tajinya. Kontribusinya terhadap ekonomi daerah tidak bisa dipandang sebelah mata dan menyimpan potensi besar untuk dikembangkan. Sub-sektor unggulan seperti kuliner, kriya, aplikasi, dan *game* menjadi motor penggerak utama, didukung oleh sub-sektor potensial lainnya seperti seni pertunjukan, fotografi/videografi, dan musik.

Transformasi digital memainkan peran krusial dalam geliat ini. Melalui digitalisasi informasi, promosi pariwisata menjadi lebih aktif, dinamis, dan menjangkau audiens yang lebih luas. Berbagai asosiasi kepariwisataan pun tumbuh subur, menunjukkan adanya kolaborasi yang kuat antar pelaku industri.

2. Perkembangan pola hidup masyarakat yang menjadikan pariwisata sebagai kebutuhan dan gaya hidup .

Saat ini, pariwisata bukan lagi sekadar kegiatan liburan sesekali, melainkan telah menjadi kebutuhan dan bagian dari gaya hidup masyarakat. Fenomena ini didorong oleh perubahan pola pikir dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi (*work-life balance*).

Masyarakat modern semakin menghargai pengalaman baru dan petualangan. Perjalanan tidak hanya dilakukan untuk bersantai, tetapi juga sebagai cara untuk mengisi ulang energi, memperluas wawasan, dan membangun koneksi sosial. Mulai dari mengunjungi kafe-kafe estetik, berburu kuliner unik di kota lain,

hingga menjelajahi alam, setiap kegiatan pariwisata menjadi bagian dari identitas diri yang dapat dibagikan di media sosial.

Pariwisata kini menjadi ekspresi diri, di mana destinasi yang dipilih, foto-foto yang diunggah, dan cerita perjalanan yang dibagikan menjadi cerminan dari minat dan gaya hidup seseorang. Hal ini menciptakan pergeseran besar dalam industri pariwisata, yang kini harus beradaptasi dengan permintaan pasar yang tidak hanya mencari tempat istirahat, tetapi juga pengalaman yang otentik, personal, dan *instagrammable*.

3. Pelaku usaha Pariwisata semakin tumbuh dan variatif.

Dalam ekosistem pariwisata saat ini, terjadi pertumbuhan yang signifikan pada jumlah pelaku usaha pariwisata. Tak hanya kuantitas, variasi layanan dan produk yang mereka tawarkan pun semakin beragam. Jika dulu industri ini didominasi oleh hotel dan biro perjalanan besar, kini kita melihat munculnya berbagai jenis usaha yang lebih spesifik dan unik.

Berkembangnya usaha penginapan alternatif seperti *homestay*, *glamping*, dan vila-vila pribadi yang menawarkan pengalaman lebih otentik. Di sektor kuliner, restoran dan kafe dengan konsep tematik semakin menjamur. Begitu juga dengan biro perjalanan yang kini tidak hanya menawarkan paket wisata umum, tetapi juga paket-paket khusus, seperti wisata petualangan, wisata budaya, atau wisata kuliner yang dirancang khusus sesuai minat wisatawan.

Munculnya inovasi ini tidak lepas dari peran teknologi dan media sosial yang memudahkan pelaku usaha baru untuk menjangkau pasar. Dampaknya, wisatawan memiliki lebih banyak pilihan yang dapat disesuaikan dengan preferensi dan anggaran mereka, sementara industri pariwisata menjadi lebih dinamis dan kompetitif.

4. Pelaku ekonomi kreatif terus tumbuh.

Perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi telah menjadi katalis bagi pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif. Jika dulu hanya segelintir orang yang berani menekuni bidang ini, sekarang kita melihat lonjakan signifikan dalam jumlah individu

dan kelompok yang berkreasi dan menghasilkan nilai ekonomi dari ide-ide mereka.

Ini termasuk para desainer grafis lepas, videografer konten, musisi *indie*, perajin lokal, hingga pengembang aplikasi dan *game*. Mereka memanfaatkan platform digital untuk memamerkan karya, berinteraksi langsung dengan *audiens*, dan menjual produk atau jasa tanpa perantara yang rumit.

Pola pikir masyarakat yang semakin menghargai produk unik dan personal juga memicu pertumbuhan ini. Mereka tidak lagi hanya mencari barang massal, melainkan juga cerita, keunikan, dan nilai di balik sebuah karya. Hal ini memberikan ruang bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk terus berinovasi dan menemukan ceruk pasar mereka. Alhasil, ekonomi kreatif kini menjadi sektor yang dinamis, penuh potensi, dan menjadi salah satu penopang utama perekonomian lokal.

5. Sektor ekonomi kreatif memiliki kontribusi yang tidak sedikit bagi ekonomi daerah dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut khususnya pada sub sektor ekonomi kreatif unggulan (Kuliner, Kriya, Aplikasi dan *Game*) dan Sub sektor ekonomi potensial (Seni Pertunjukan, Fotografi/ *Videografi*, Musik).
6. Digitalisasi informasi menunjang promosi pariwisata yang aktif dan dinamis.

Dunia pariwisata telah berubah secara drastis dengan adanya digitalisasi informasi. Ini bukan sekadar tren, melainkan sebuah revolusi yang membuat promosi pariwisata menjadi jauh lebih aktif dan dinamis dari sebelumnya.

Dulu promosi hanya mengandalkan brosur atau iklan televisi yang jangkauannya terbatas. Sekarang, dengan kekuatan media sosial, situs *web*, dan aplikasi perjalanan, setiap destinasi bisa "berbicara" langsung kepada calon wisatawan di seluruh dunia. Informasi mengenai tempat wisata, kegiatan yang bisa dilakukan, hingga ulasan dari pengunjung lain bisa diakses dalam hitungan detik.

Fenomena ini mendorong terciptanya interaksi dua arah. Para pelaku pariwisata bisa secara langsung membagikan konten yang

menarik, seperti foto dan video berkualitas tinggi, serta mengadakan promosi *real-time*. Di sisi lain, calon wisatawan dapat dengan mudah menemukan informasi, bertanya, bahkan memesan tiket atau akomodasi hanya dengan beberapa klik. Alhasil, promosi tidak lagi pasif, melainkan menjadi sebuah percakapan yang berkelanjutan, menciptakan pengalaman yang lebih personal dan menarik bagi setiap individu yang ingin menjelajahi dunia.

7. Asosiasi kepariwisataan semakin tumbuh.

Pemandangan industri pariwisata saat ini diperkaya dengan meningkatnya jumlah dan peran asosiasi kepariwisataan. Entitas ini tak lagi menjadi organisasi pasif; sebaliknya, mereka tumbuh menjadi wadah kolaborasi yang vital bagi para pelaku industri.

Asosiasi ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha, memastikan kebijakan yang dibuat selaras dengan kebutuhan di lapangan. Lebih dari itu, mereka menjadi tempat para profesional bertukar pikiran, berbagi praktik terbaik, dan menghadapi tantangan bersama.

Kehadiran asosiasi yang kuat ini juga memberikan dampak positif bagi wisatawan. Dengan adanya standar dan etika yang dijaga bersama, kualitas layanan pariwisata menjadi lebih terjamin. Pada akhirnya, pertumbuhan asosiasi kepariwisataan mencerminkan kematangan industri yang tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak bersama dalam satu visi untuk memajukan sektor pariwisata secara berkelanjutan.

8. Kesadaran masyarakat untuk mewujudkan desa wisata semakin tumbuh dan berkembang.

Terdapat pergeseran pola pikir yang signifikan di tengah masyarakat pedesaan. Semakin banyak warga yang menyadari potensi besar di sekitar mereka, sehingga kesadaran untuk mewujudkan desa wisata semakin tumbuh dan berkembang.

Mereka tidak lagi melihat desa hanya sebagai tempat tinggal, melainkan juga sebagai aset berharga yang memiliki daya

tarik wisata. Dengan semangat gotong royong, warga desa mulai berinisiatif untuk mengelola potensi alam, budaya, dan kearifan lokal.

Inisiatif ini memunculkan berbagai inovasi, mulai dari membangun area camping yang dikelola komunitas, melestarikan seni pertunjukan tradisional, hingga menawarkan paket *homestay* yang autentik. Dampaknya pun sangat nyata. Desa wisata tidak hanya meningkatkan pendapatan warga, tetapi juga membangkitkan kebanggaan lokal dan semangat untuk menjaga kelestarian lingkungan serta tradisi. Fenomena ini membuktikan bahwa pariwisata bisa tumbuh dari bawah, didorong oleh partisipasi aktif dan kesadaran kolektif dari masyarakat itu sendiri.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara keseluruhan, Rancangan Awal RKPD mencakup beberapa program utama untuk Bidang Pariwisata dan program penunjang pemerintahan daerah. Namun, setelah analisis kebutuhan, terdapat beberapa penyesuaian yang signifikan, terutama dalam alokasi anggaran, meskipun target capaiannya tetap sama.

Secara keseluruhan, total pagu indikatif pada rancangan awal adalah Rp 40,900,000,000 sedangkan total kebutuhan dana setelah analisis meningkat menjadi Rp 43,101,208,364. Kenaikan ini menunjukkan adanya kebutuhan pendanaan yang lebih besar dari perkiraan awal untuk mencapai target yang ditetapkan.

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata: Anggaran untuk program ini berkurang drastis dari Rp 10.225.000.000 pada rancangan awal menjadi Rp 5.100.000.000 setelah analisis. Meskipun targetnya tetap sama, yaitu mengembangkan 30% daya tarik wisata, terjadi penyesuaian signifikan pada beberapa kegiatan:

1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi mengalami penurunan pagu dari Rp 3.427.000.000 menjadi Rp 1.223.000.
2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi juga turun dari Rp 2.475.000.000 menjadi Rp 250.000.000.
3. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi, dari Rp 3.573.000.000 menjadi Rp 3.376.000.000.

Program Pemasaran Pariwisata: Alokasi anggaran untuk program ini menurun dari Rp 3.500.000.000 menjadi Rp 2.200.000.000. Targetnya tetap melaksanakan 4 kegiatan

pemasaran untuk meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara.

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif: Kebutuhan dana untuk program ini meningkat sangat signifikan, dari Rp 5.218.000.000 menjadi Rp 15.105.000.000. Kenaikan ini terutama disebabkan kebutuhan yang lebih besar untuk Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif, dari Rp 3.005.000.000 menjadi Rp 5.514.000.000 dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dari Rp 2.213.000.000 menjadi Rp 9.590.000.000.

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terdapat penurunan kebutuhan anggaran untuk program ini, dari Rp 5.250.000.000 menjadi Rp 1.778.000.000. Penurunan ini terjadi pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM turun dari Rp 4.700.000.000 menjadi Rp 1.478.000.000 dan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif turun dari Rp 550.000.000 menjadi Rp 300.000.000.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Timur
Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat if (dalam juta)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (dalam juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata		Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW)	30%	10.225	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata		Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW)	30%	5.100	
1.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Persentase Lokasi Daya Tarik Wisata yang Dikelola	33,3%	3.573	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Persentase Lokasi Daya Tarik Wisata yang Dikelola	33,3%	3.376	
1.2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Persentase Kawasan Strategis yang Dikelola	100%	3.427	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Persentase Kawasan Strategis yang Dikelola	100%	1.223	
1.3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Persentase Destinasi yang Dikelola	100%	2.475	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Persentase Destinasi yang Dikelola	100%	250	
1.4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata		Persentase Rekomendasi Tanda Daftar Usaha	100%	750	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah		Persentase Rekomendasi Tanda Daftar Usaha	100%	250+	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat if (dalam juta)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (dalam juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Pariwisata yang Diterbitkan			Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Pariwisata yang Diterbitkan			
2	Program Pemasaran Pariwisata		Rata-rata lama tinggal wisatawan - (BPS) Nusantara Mancanegara	1,65 2,70	3.500	Program Pemasaran Pariwisata		Rata-rata lama tinggal wisatawan - (BPS) Nusantara Mancanegara	1,65 2,70	2.200	
2.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Terhadap Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Kegiatan)	4 Kegiatan	3.500	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Terhadap Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Kegiatan)	4 Kegiatan	2.200	
3	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual		Persentase Tercapainya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan (%)	100 %	5.218	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual		Persentase Tercapainya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan (%)	100 %	15.105	
3.1	Penyediaan		Jumlah Sarana	1 lokasi	3.005	Penyediaan		Jumlah Sarana	1 lokasi	5.514	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat if (dalam juta)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (dalam juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		dan Prasarana Kota Kreatif yang Disediakan (Lokasi)			Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		dan Prasarana Kota Kreatif yang Disediakan (Lokasi)			
3.2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (%) (4 sub sektor : Kuliner, kriya-wastra, seni pertunjukan, Aplikasi)	100 %	2.213	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (%) (4 sub sektor : Kuliner, kriya-wastra, seni pertunjukan, Aplikasi)	100 %	9.590	
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		Persentase Tercapainya jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan SDM-nya (%)	100 %	5.250	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		Persentase Tercapainya jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan SDM-nya (%)	100 %	1.778	
4.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Jumlah SDM Parekraf yang Tersertifikasi (Orang)	50 Orang	4.700	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Jumlah SDM Parekraf yang Tersertifikasi (Orang)	50 Orang	1.478	
4.2	Pengembangan Kapasitas		Jumlah Subsektor Ekraf	4 Sub Sektor	550			Jumlah Subsektor Ekraf	4 Sub Sektor	300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat if (dalam juta)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (dalam juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaku Ekonomi Kreatif		yang dikembangkan Kapasitasnya (Subsektor)					yang dikembangkan Kapasitasnya (Subsektor)			
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	81 Indeks 100%	16.707	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	81 Indeks 100%	19.354	
5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	90%	1.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	90%	800	
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	82%	11.902	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	82%	14.275	
5.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	70%	50	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	70%	31	
5.3	Administrasi	Samarinda	Jumlah Laporan	12	1.993	Administrasi	Samarinda	Jumlah Laporan	12	459	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat if (dalam juta)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (dalam juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan		Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan		
5.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah (bulan)	12 bulan	1.621	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah (bulan)	12 bulan	2.688	
5.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	12 bulan	140	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	12 bulan	639	
TOTAL					40.900	TOTAL					43.101

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pembangunan Pariwisata Kalimantan Timur juga ikut mewujudkan beberapa misi Jospol yang digagas oleh Gubernur diantaranya jospol 4 yaitu “Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM” melalui kegiatan pelatihan dan sertifikasi profesi, dan juga jospol 5 yaitu “Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa” melalui kegiatan Lomba dan Jambore Desa/Kampung Wisata Se-Kalimantan Timur dan juga promosi pariwisata.

Usulan program dan kegiatan pada tabel T-C.32 diperoleh melalui proses penjangkaran aspirasi masyarakat, masukan dari pemangku kepentingan, serta hasil kajian perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Misalnya, program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata di Kota Bontang, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Timur merupakan respon terhadap kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana penunjang destinasi wisata serta upaya pengembangan Geopark Sangkulirang - Mangkalihat. Usulan ini sejalan dengan isu strategis peningkatan kualitas destinasi wisata, sekaligus mendukung tugas pokok perangkat daerah dalam penyediaan infrastruktur kepariwisataan.

Selanjutnya, program pemasaran pariwisata yang meliputi Pameran Unggulan Nasional, Fasilitas *Table Top East Kalimantan*, Bali *Beyond Travel Fair*, Bincang-Bincang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemilihan Duta dan Putri Pariwisata Kalimantan Timur, serta partisipasi dalam berbagai *event* berskala nasional maupun internasional, merupakan bentuk penguatan promosi destinasi pariwisata daerah. Kegiatan ini sesuai dengan isu peningkatan daya saing

pariwisata dan mendukung fungsi perangkat daerah dalam hal promosi dan pemasaran.

Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, yang mencakup Sarahsehan Pelaku Ekonomi Kreatif, *East Borneo International Folklore Festival*, Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Produksi Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, hingga penyediaan Sarpras Temindung *Creative Hub* disusun berdasarkan kebutuhan pelaku ekonomi kreatif akan perlindungan dan pengembangan usaha. Hal ini relevan dengan isu penguatan ekosistem ekonomi kreatif serta mendukung fungsi perangkat daerah dalam pemberdayaan pelaku industri kreatif.

Adapun program pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mencakup pelatihan tata kelola destinasi pada desa wisata, sertifikasi tenaga kerja pariwisata, fasilitasi *workshop* SDM ekonomi kreatif, serta berbagai bentuk pelatihan inovasi, disusun untuk menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM. Usulan tersebut sesuai dengan isu peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mendukung pelaksanaan tugas pokok perangkat daerah dalam meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2026 Provinsi Kalimantan Timur
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Provinsi Kalimantan Timur	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%) (mancanegara dan nusantara)	%	
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah destinasi wisata yang meningkat daya tariknya		
	Sub kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Lokasi	
	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Daya Tarik Wisata di KSPP yang dikelola		
	Sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Unit	
	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Orang	
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola		
	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Orang	
	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)	Provinsi Kalimantan	Persentase pelaku usaha pariwisata yang berstandar	%	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Daerah Provinsi	an Timur			
	Sub kegiatan Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	Unit Usaha	
	Sub kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Laporan	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Provinsi Kalimantan Timur	Persentase Peningkatan jumlah tayangan media pemasaran pariwisata (%)	%	
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah destinasi wisata dan kawasan strategis pariwisata yang berhasil dipromosikan		
	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Provinsi Kalimantan Timur	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	%	
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Provinsi Kalimantan Timur	Persentase pelaku wisata (Parekraf) yang terfasilitasi pengembangan kapasitas dan sertifikasi	%	
	Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	
	Kegiatan Pelaksanaan	Provinsi	Persentase	%	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Kalimantan Timur	kerjasama peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku pariwisata dan ekraf yang berjalan dengan baik		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	Provinsi Kalimantan Timur	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	%	
	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Provinsi Kalimantan Timur	Persentase pelaku ekraf yang terhubung dengan ekosistem ekraf	%	
	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	
	Sub Kegiatan Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah terlaksanakannya pendukung pemasaran ekonomi kreatif	Promosi	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga	
	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Provinsi Kalimantan Timur	Presentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang di sediakan	%	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan	
	Sub Kegiatan Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Dokumen	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Kalimantan Timur	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	%	
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu (%)	%	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunannya	Laporan	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan barang dan Jasa	Laporan	
	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Provinsi Kalimantan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	Dokumen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Undangan	an Timur	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	
	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	%	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	
	Sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaان Bab VI Pasal 7,8 dan 9 adalah ; Pembangunan Kepariwisataاان dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataاان yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataاان nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataاان provinsi, dan rencana induk pembangunan kabupaten/kota..

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 – 2025 dan Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Talanpekda) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 - 2025

Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dalam Ripparnas 2010 – 2025, yang dapat dirangkum sebagai berikut:

PROVINSI	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL/KPPN (RIPPARNAS)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (RIPPARNAS)	DESTINASI PARIWISATA NASIONAL/D PN (RIPPARNAS)
Kalimantan Timur	1. KPPN Long Apari dskt		DPN LONG BAGUN– MELAK dskt
	2. KPPN Long Bagun dskt	KSPN. Long Bagun dskt	
	3. KPPN Melak–Kersik Luway dskt		
	4. KPPN Kota Bangun– Tanjung Isuy dskt	KSPN. Kota Bangun–Tanjung Isuy dskt	DPN TENGGARON G– BALIKPAPAN dskt
	5. KPPN Tenggarong dskt		
	6. KPPN Samarinda Kota dskt		
	7. KPPN Bontang–Sangata dskt		
	8. KPPN Balikpapan– Semboja dskt		
	9. KPPN Tanjung Redeb dskt		DPN DERAWAN– KAYAN MENTARANG dskt
	10.KPPN Derawan– Sangalaki dskt	KSPN. Derawan– Sangalaki dskt	

PROVINSI	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL/KPPN (RIPPARNAS)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (RIPPARNAS)	DESTINASI PARIWISATA NASIONAL/D PN (RIPPARNAS)
Kalimantan Utara	1.KPPN Kayan Mentarang dskt	KSPN. Kayan Mentarang dskt	
	2.KPPN Tarakan dskt		

Kebijakan Nasional terhadap Pariwisata khususnya Kalimantan Timur adalah.

Rekomendasi Pengembangan Pariwisata Kaltim meliputi:

1. Percepatan penetapan RIPPARDA Provinsi dan Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur
2. Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kuantitas serta kualitas aksesibilitas menuju KSPN&KPPN
3. Percepatan Implementasi pendaftaran usaha pariwisata.
4. Diseminasi Standar dan Sertifikasi Usaha Pariwisata kepada Pelaku usaha pariwisata.
5. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata dan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Pariwisata;
6. Diseminasi ACCSTP kepada pelaku dan SDM Usaha Pariwisata
7. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Usaha Pariwisata;
8. Identikasi kebutuhan WPA dan Auditor Usaha Pariwisata, disampaikan kepada Kementerian Pariwisata C.q. Direktorat Industri Pariwisata & Pusat kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.
9. Penyusunan Travel Pattern Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjadi obyek pariwisata andalan dan terpelihara untuk mendatangkan wisatawan yang berimbas pada peningkatan ekonomi masyarakat.

yang dielaborasikan dalam program dan kegiatan untuk mewujudkan visi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, yaitu **“Terwujudnya Kalimantan Timur menjadi Daerah Tujuan Pariwisata yang berdaya saing”** dalam mendukung perwujudan visi Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan.

3.2.1 Tujuan

Tujuan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan.

Berdasarkan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim menetapkan tujuan sebagai berikut:

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas maka telah ditetapkan 5 (lima) tujuan strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kepariwisataan kalimantan timur yang berdaya saing.;
- b. Meningkatnya industri pariwisata sebagai penopang perekonomian daerah;
- c. Meningkatnya Kualitas persembahan Seni dan Budaya yang mendukung daya tarik pariwisata;
- d. Meningkatnya Penyelenggaraan Kepariwisata yang Profesional dan Akuntabel.

3.2.2 Sasaran

Sasaran dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan meningkatnya kepariwisataan kalimantan timur yang berdaya saing dijabarkan menjadi lima sasaran strategis, yaitu:
 - 1) Daya tarik wisata di 7 (Tujuh) kawasan pengembangan pariwisata (KPP) berdaya saing;
 - 2) Kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisata nusantara meningkat;
 - 3) Banyaknya karya seni budaya yang dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata;
 - 4) Banyaknya karya seni budaya yang dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata;
 - 5) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
 - 6) Meningkatnya kualitas sarana prasarana aparatur;
 - 7) Terpenuhinya urusan kelembagaan pemerintah daerah;

- 8) Dokumen perencanaan pengendalian evaluasi disusun tepat waktu.
- b. Tujuan meningkatnya industri pariwisata sebagai penopang perekonomian daerah dijabarkan menjadi dua sasaran strategis, yaitu:
 - 1) Meningkatnya usaha jasa dan sarana pariwisata;
 - 2) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.
- c. Tujuan menggali, melestarikan, mengembangkan serta meningkatnya seni dan budaya sebagai karakter jati diri dan pemersatu bangsa dijabarkan menjadi dua sasaran strategis, yaitu:
 - 1) Meningkatnya Pengembangan budaya di Kalimantan Timur;
 - 2) Meningkatnya industri ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya.
- d. Tujuan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian Dinas Pariwisata dijabarkan menjadi tiga sasaran strategis, yaitu:
 - 1) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Dinas Pariwisata;
 - 2) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset dan kepegawaian Dinas Pariwisata; dan
 - 3) Meningkatnya Kapasitas Aparatur.
- e. Tujuan meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata dijabarkan menjadi tiga sasaran strategis, terdiri:
 - 1) Meningkatnya kualitas perencanaan Dinas Pariwisata;
 - 2) Meningkatnya kinerja Dinas Pariwisata; dan
 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.3 Program dan Kegiatan

Kebijakan nasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk tahun 2025 berfokus pada percepatan sektor pariwisata melalui berbagai program unggulan. Program ini mencakup transformasi digital (*Tourism 5.0*), Gerakan Wisata Bersih, peningkatan pariwisata berbasis minat khusus (seperti gastronomi, wisata bahari, dan *wellness tourism*),

penyelenggaraan acara berskala global dengan kekayaan intelektual Indonesia, dan pengembangan desa wisata berbasis komunitas. Program ini ditargetkan untuk mencapai 1,8 miliar pergerakan wisatawan domestik, 16 juta wisatawan mancanegara, dan berkontribusi 4,6% terhadap PDRB nasional pada 2025.

Penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur memberikan dampak positif pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif lokal. Pembangunan IKN menjadi daya tarik utama yang meningkatkan jumlah kunjungan, baik untuk keperluan kerja maupun wisata. Peningkatan ini juga berkontribusi pada pertumbuhan tingkat hunian dan bisnis kuliner di sekitar IKN.

Program nasional Kementerian Pariwisata memiliki implikasi signifikan bagi Kalimantan Timur:

1. Peningkatan Pariwisata Berbasis Minat Khusus: Dengan adanya program nasional yang mendorong wisata berbasis minat khusus, Kalimantan Timur memiliki peluang besar untuk mengembangkan berbagai potensi wisata alamnya, seperti hutan, sungai, dan arung jeram, serta wisata bahari. Pemerintah dan otoritas IKN juga telah bekerja sama untuk mengembangkan destinasi wisata baru seperti Goa Tapak Raja dan Bukit Bangkirai, yang berdekatan dengan IKN.
2. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Komunitas: Program ini sangat relevan bagi Kalimantan Timur, di mana kesadaran masyarakat untuk mewujudkan desa wisata terus tumbuh. Dukungan dari pusat dapat mempercepat pengembangan desa-desa wisata, memberdayakan masyarakat lokal, dan melestarikan kearifan lokal seperti seni musik dan ukiran Dayak Kenyah.
3. Gerakan Wisata Bersih dan Transformasi Digital: Program ini sejalan dengan kebutuhan Kalimantan Timur. Meningkatnya jumlah kunjungan ke IKN dan sekitarnya memerlukan pengelolaan kebersihan dan sanitasi yang lebih baik. Selain itu, digitalisasi dalam promosi dan layanan pariwisata akan sangat membantu provinsi dalam memasarkan potensinya kepada wisatawan domestik dan mancanegara.

Secara keseluruhan, program nasional Kementerian Pariwisata memberikan kerangka strategis yang dapat dimanfaatkan oleh Kalimantan Timur untuk mengintegrasikan potensi lokalnya dengan

pembangunan IKN, sehingga pariwisata dan ekonomi kreatif dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur berkontribusi aktif dalam mendukung program unggulan Kepala Daerah, terutama yang berfokus pada pariwisata dan ekonomi kreatif. Kontribusi ini terlihat melalui berbagai strategi dan program yang terintegrasi dengan visi pembangunan provinsi. Salah satu program unggulan Kepala Daerah adalah pengembangan pariwisata dan budaya berbasis desa.

Strategi dan Kontribusi Utama Dinas Pariwisata antara lain:

1. Pengembangan Destinasi dan Ekonomi Kreatif: Dinas Pariwisata berfokus pada optimalisasi sarana dan prasarana destinasi wisata yang sudah ada, sekaligus membangun destinasi baru. Strategi ini melibatkan pelibatan masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan komunitas pariwisata. Pendekatan ini sejalan dengan program unggulan kepala daerah untuk mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan mengembangkan pariwisata berbasis desa.
2. Digitalisasi dan Promosi: Dinas Pariwisata mengoptimalkan promosi melalui berbagai platform digital, seperti media sosial, *website*, dan digital *marketing*. Strategi ini bertujuan untuk membangun identitas tempat wisata (*branding*) dan menargetkan segmen wisatawan yang tepat. Hal ini mendukung program pemerintah daerah yang mendorong ekonomi kreatif dan digital.
3. Peningkatan Kapasitas SDM: Dinas Pariwisata mengadakan berbagai pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Program seperti *workshop* digitalisasi *branding* dan promosi desa wisata diadakan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor ini. Peningkatan kualitas SDM ini krusial untuk menghadapi bonus demografi dan mewujudkan visi Kalimantan Timur yang berdaya saing global.
4. Kolaborasi dan Sinergi: Dinas Pariwisata juga berperan dalam mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memajukan sektor pariwisata. Selain itu, Dinas Pariwisata mengadakan acara dan festival lokal, seperti Apresiasi Kreasi Kalimantan Timur, sebagai wadah bagi pelaku seni dan ekonomi kreatif untuk mempromosikan potensi mereka.

Sesuai dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah “Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah” dengan Isu Strategis “Menuju Kalimantan Timur sebagai daerah Tujuan Wisata Kelas dunia”.

Hal tersebut mendorong setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat merealisasikan dalam program kegiatan dalam rencana kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2026 dari pendanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur sebagai program penunjang adalah sebagai berikut ;

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- c) Program Pemasaran Pariwisata
- d) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- e) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
							Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				43.101.208.364				32.625.588.000
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				43.101.208.364	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum Dana Bagi Hasil			32.625.588.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti		82 Indeks 100%	18.917.009.763				19.075.588.000
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu		90%	800.000.000				1.000.000.000
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua	6 Dokumen	365.343.287	Dana Alokasi Umum			700.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kel/Desa						
3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	166.369.320	Dana Alokasi Umum			150.000.000
3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	268.287.393	Dana Alokasi Umum			150.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu		82%	14.275.928.578				14.333.287.000
3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74 Orang/ Bulan	13.879.208.578	Pajak Daerah Dana Alokasi UmumDana Bagi Hasil			13.861.287.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	396.720.000	Pajak Daerah			472.000.000
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		70%	31.296.000				-
3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Paket	31.296.000	Dana Bagi Hasil			-
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan barang dan Jasa		12 Bulan	459.013.266				305.601.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	31.909.699	Dana Bagi Hasil			-
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	142.254.345	Dana Bagi Hasil			-
3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semayang Kab.	30 Paket	26.111.545	Dana Bagi Hasil			-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana				
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Kutai Barat, Jempang, Tanjung Isuy							
3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	6.750.000	Dana Bagi Hasil			-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Paket	80.017.097	Dana Bagi Hasil			-
3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	13.860.000	Dana Bagi Hasil			-
3.26.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	19.376.580	Pajak Daerah			-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana				
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Laporan	138.734.000	Dana Bagi Hasil			305.601.000	
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Unit	22.381.288				200.000.000	
3.26.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semayan	20 Unit	22.381.288	Dana Bagi Hasil			200.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			g Kab. Kutai Barat, Jempang, Tanjung Isuy						
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 Bulan	2.688.598.600				2.716.700.000
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan	12 Laporan	719.108.600	Pajak Daerah			716.700.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			n, Semua Kel/Desa							
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.969.490.000	Pajak Daerah			2.000.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana				
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik		80%	639.792.031				520.000.000	
3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	290.238.500	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil			330.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	21.503.531	Dana Bagi Hasil			30.000.000
3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semayang Kab.	30 Unit	328.050.000	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil			160.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kutai Barat, Jempang, Tanjung Isuy						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana				
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	-	0,5%	5.100.000.000			0.5	5.250.000.000	
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Destinasi Wisata yang Meningkatkan Daya		4 Destinasi	3.376.667.200			7 Destinasi	1.650.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tariknya							
3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Lokasi	2.976.667.200	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil		3	1.200.000.000
3.26.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Orang	400.000.000	Dana Bagi Hasil		95	450.000.000
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Daya Tank Wisata di KSPP yang dikelola		4 DTW	1.223.332.800			7	2.800.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	873.332.800	Dana Bagi Hasil		3	2.400.000.000
3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Orang	350.000.000	Pajak Daerah		95	400.000.000
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikelola		2 Destinasi	250.000.000			7	350.000.000
3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Orang	250.000.000	Pajak Daerah		95	350.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah yang berstandar		10	250.000.000			15	450.000.000	
3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	125.000.000	Dana Bagi Hasil		10	250.000.000	
3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	125.000.000	Dana Bagi Hasil		1	200.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah Tayangan Media Pemasaran Pariwisata	-	29,1%	2.200.000.000			29,74 %	1.500.000.000	
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Wisata dan Kawasan Strategis Pariwisata yang Berhasil dipromosikan		30 Destinasi	2.200.000.000			30	1.500.000.000	
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	1.300.000.000	Dana Bagi Hasil		11	950.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	300.000.000	Dana Bagi Hasil		5	250.000.000	
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Kegiatan	600.000.000	Dana Bagi Hasil		5	350.000.000	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual		5,07%	15.105.601.579			5,07%	5.300.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Presentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang disediakan		11%	5.514.850.851			11	3.450.000.000
3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	151.820.000	Dana Bagi Hasil		2	200.000.000
3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	72.930.513	Dana Bagi Hasil		5	250.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.290.100.338	Dana Bagi Hasil		1	3.000.000.000
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terhubung dengan Ekosistem Ekonomi Kreatif		10%	9.590.750.728			10	1.850.000.000
3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.584.485	Dana Bagi Hasil		1	100.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	43.400.000	Dana Bagi Hasil		10	375.000.000
3.26.04.1.02.0014	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Promosi	268.581.000	Dana Bagi Hasil		2	150.000.000
3.26.04.1.02.0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	2.192.700.000	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil		1	100.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.04.1.02.0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	6.913.485.243	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil		1	1.000.000.000
3.26.04.1.02.0020	Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Produk	72.000.000	Dana Bagi Hasil		25	125.000.000
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi		1,16%	1.778.597.022			1,16%	1.500.000.000
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Kerjasama Peningkatan Pengetahuan dan		0.85 %	1.478.597.022			0,85	1.200.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tingkat Lanjutan	Keterampilan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berjalan dengan Baik							
3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Orang	728.597.022	Dana Alokasi Umum		120	550.000.000
3.26.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	250.000.000	Dana Alokasi Umum		3	250.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Orang	350.000.000	Dana Alokasi Umum		90	250.000.000
3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	150.000.000	Dana Alokasi Umum		30	150.000.000
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Wisata (Parekraf) yang Terfasilitasi Pengembangan Kapasitas dan Sertifikasi		0.31 %	300.000.000			0,31	300.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana				
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Orang	300.000.000	Dana Alokasi Umum		90	300.000.000	

3.3.1 Fokus Program Kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2026

Penjelasan Rencana Program dan Kegiatan Pariwisata
Tahun Anggaran 2025.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan pagu rencana sebesar Rp. 18.917.009.763,-

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan pagu rencana sebesar Rp. 5.100.000.000,-

- 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
- 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
- 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
- 4) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3. Program Pemasaran Pariwisata dengan pagu rencana sebesar Rp. 2.200.000.000,-

- 1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan pagu rencana sebesar Rp. 15.105.601.579,-

- 1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
- 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dengan pagu rencana sebesar Rp. 1.778.597.022,-

- 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan.
- 2) Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata memiliki 5 (lima) program dan 16 (enam belas) kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pembangunan Pariwisata Kalimantan Timur juga ikut mewujudkan beberapa misi Jospol yang digagas oleh Gubernur diantaranya jospol 4 yaitu “Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM” melalui kegiatan pelatihan dan sertifikasi profesi, dan juga jospol 5 yaitu “Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa” melalui kegiatan Lomba dan Jambore Desa/Kampung Wisata Se-Kalimantan Timur dan juga promosi pariwisata.

Program Pemasaran Pariwisata yang meliputi Pameran Unggulan Nasional, Fasilitas *Table Top East Kalimantan*, *Bali Beyond Travel Fair*, Bincang-Bincang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemilihan Duta dan Putri Pariwisata Kalimantan Timur, serta partisipasi dalam berbagai *event* berskala nasional maupun internasional, merupakan bentuk penguatan promosi destinasi pariwisata daerah. Kegiatan ini sesuai dengan isu peningkatan daya saing pariwisata dan mendukung fungsi perangkat daerah dalam hal promosi dan pemasaran.

Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, yang mencakup Sarahsehan Pelaku Ekonomi Kreatif, *East Borneo International Folklore Festival*, Fasilitas Pelaku Ekonomi Kreatif, Fasilitas Produksi Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, hingga penyediaan Sarpras Temindung *Creative Hub* disusun berdasarkan kebutuhan pelaku ekonomi kreatif akan perlindungan dan pengembangan usaha. Hal ini relevan dengan

isu penguatan ekosistem ekonomi kreatif serta mendukung fungsi perangkat daerah dalam pemberdayaan pelaku industri kreatif.

Adapun program pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mencakup pelatihan tata kelola destinasi pada desa wisata, sertifikasi tenaga kerja pariwisata, fasilitasi *workshop* SDM ekonomi kreatif, serta berbagai bentuk pelatihan inovasi, disusun untuk menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM. Usulan tersebut sesuai dengan isu peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mendukung pelaksanaan tugas pokok perangkat daerah dalam meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2026	
				TARGET	PAGU(Rp)
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				Rp 43.101.208.364
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp 18.917.009.763
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	Kalimantan Timur, Luar Daerah	90%	Rp 800.000.000
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Kalimantan Timur	82%	Rp 14.275.928.578
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kalimantan Timur, Luar Daerah	70%	Rp 3.1296.000
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan barang dan Jasa	Kalimantan Timur, Luar Daerah	12 Bulan	Rp 459.013.266
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kalimantan Timur	1 Unit	Rp. 22.381.288
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	12 Bulan	Rp 2.688.598.600
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	Kalimantan Timur	80%	Rp 639.792.031
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				Rp 5.100.000.000
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Destinasi Wisata yang Meningkatkan Daya Tariknya	Kalimantan Timur	4 Destinasi	Rp 3.376.667.200
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata di KSPP yang Dikelola	Kalimantan Timur	4 DTW	Rp 1.223.332.800
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikelola	Kalimantan Timur	2 Destinasi	Rp 250.000.000

KODE	PROG/KEG	INDIKATOR	LOKASI	TAHUN 2026	
				TARGET	PAGU(Rp)
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pelaku Usaha Pariwisata yang Berstandar	Kalimantan Timur	100 %	Rp 250.000.000
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				Rp 2.200.000.000
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Wisata dan Kawasan Strategis Pariwisata yang Berhasil Dipromosikan	Kota Samarinda, Kab Kutai Kartanegara, Kab Kutai Barat, Luar Daerah	30 Destinasi	Rp 2.200.000.000
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				Rp 15.105.601.579
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Berfungsi dengan Baik</i>	Kab Kutai Kartanegara, Kab Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Bontang	11 %	Rp 5.514.850.851
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terhubung dengan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab Berau, Kab Paser, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kab Penajam Paser utara, Kab Mahakam Ulu	10 %	Rp 9.590.750.728
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				Rp 1.778.597.022
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Kerjasama Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berjalan dengan Baik	Kalimantan Timur, Luar Daerah	0,85 %	Rp 1.478.597.022
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Wisata (Parekraf) yang Terfasilitasi Pengembangan Kapasitas dan Sertifikasi	Kalimantan Timur, Luar Daerah	0,31 %	Rp 131.712.774

BAB V

P E N U T U P

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029.

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur diberikan amanah dan tanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata berdasarkan pada tujuan, sasaran, dan Program Kerja yang telah ditetapkan baik dalam Rencana Strategis Dispar 2025 – 2029, Renja 2026, serta Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Kalimantan Timur tahun 2025.

Program kegiatan yang telah disepakati dalam dokumen RPJMD di dalam rencana kerja tahun 2026 ini agar dapat dimaksimalkan dukungan pendanaan untuk mencapai target akhir Renstra SKPD dan RPJMD pada 2027 mendatang.

Untuk selanjutnya tataran indikator kinerja utama ini perlu untuk dibahas lebih lanjut agar terdapat penajaman-penajaman yang sesuai dengan perkembangan Kepariwisata Kalimantan Timur dengan melihat isu-isu nasional yang berkembang. Sehingga tercapai Visi Misi Dinas Pariwisata untuk mendukung Visi Misi Gubernur Kalimantan Timur Terpilih yang telah dituangkan dalam RPJMD 2025 – 2029.

Akhirnya dengan harapan Dinas Pariwisata tentunya dapat menyumbangkan pembangunan kepada masyarakat menjadi lebih maju dan meningkat dibidang Pariwisata

Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Kalimantan Timur

Ririn Sari Dewi, S.IP, M.Si
Pembina utama Muda
NIP. 197304171999032007

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH
PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Prov. Kalimantan Timur telah dilaksanakan kesepakatan forum lintas perangkat daerah dalam rangka penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Prov. Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029, dan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 khususnya pengampu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur Tahun 2025-2030 pada **Sasaran 1 Terakselerasinya Perekonomian Daerah**, dihadiri oleh perangkat daerah dan pihak pemangku kepentingan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pengantar Dari Pimpinan Rapat (Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan)
2. Penyampaian materi :
 - a. Penyampaian Output Utama Sektor Perkebunan dalam Mendukung LPE (Kepala Dinas Perkebunan)
 - b. Penyampaian Output Utama Sektor Pariwisata dalam Mendukung LPE (Kepala Dinas Pariwisata)
 - c. Penyampaian Output Utama DPPKUKM dalam mendukung LPE, Kontribusi PDRB Industri Pengolahan serta Pengendalian Inflasi melalui Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah)
 - d. Penyampaian Output Utama Sektor Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Mendukung LPE (Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim)
 - e. Penyampaian Output Utama Sektor Peternakan dalam Mendukung LPE (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim)
 - f. Penyampaian Output Utama Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung LPE (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim)
 - g. Penyampaian Output Utama Sektor Kehutanan dalam Mendukung LPE (Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim)

- h. Penyampaian Output Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Mendukung LPE (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim)
 - i. Pengendalian Inflasi melalui Optimalisasi TPID (Kepala Biro Perekonomian)
 - j. Strategi memperkuat Daya Saing untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kaltim (Kepala BRIDA Prov. Kaltim)
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum lintas perangkat daerah terhadap sasaran Akselerasi Perekonomian Daerah sebagaimana terlampir pada Lampiran IV, maka pada:

Forum Lintas Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

MENYEPAKATI

- KESATU : Indikasi Program Prioritas dan Output Utama Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA : Indikasi Program Perangkat Daerah dan Output Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Saran, masukkan dan koreksi forum lintas perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KEEMPAT : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 22 April 2025
Pimpinan Sidang

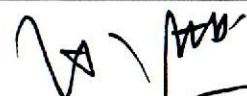
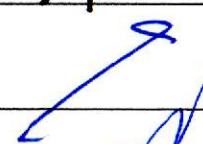


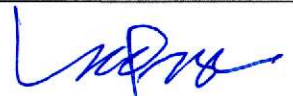
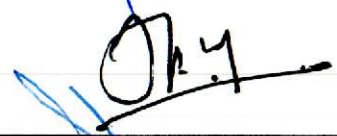
Ir. Ujang Rachmad, M.Si

LAMPIRAN I**Penandatanganan Kesepakatan oleh Peserta Forum Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029****DPRD Provinsi Kalimantan Timur**

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
1			Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Timur	

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
1	Wahyu Gatut Purboyo, S.Pi, M.Si	Kabid PSDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim	
2	H. Warsito, ST	Sekretaris	Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim	
3	Ir. Hj. Rini Susilawati, M.Si.	Sekretaris	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim	
4	Andi Siddik, SP, M.Ling	Plt. Kadis	Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	

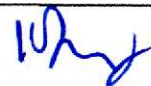
No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
5	Fahmi Himawan, S.T., M.T..	Kepala Dinas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim	
6	H. Irhan Hukmaidy, S.Pi, MP	Kepala Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim	
7	H. Mohammad Subiyantoro, S.Hut., M.Si.,	Sekretaris	Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	
8	Herlina Eka Yanti, SE, M.Si	Adyatama Kepariwisataaan Ahli Muda	Dinas Pariwisata Prov. Kaltim	
10	H. Fahmi Prima Laksana, S.E.,MM.	Kepala Dinas	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim	
11			Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	
12			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim	
13			Dinas Sosial Prov. Kaltim	
14			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim	

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
15	Dr. M. Ir. Fitriansyah, ST, MM	Kepala Dinas	Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Kaltim	
16	Anik Suhartatik, S.Sos	Kabag Kebijakan Perekonomian	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim	

Tim Transisi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
1	Dr. Achmad Zaini		Tim Transisi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas	

Instansi Vertikal

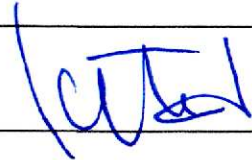
No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
1			Bank Indonesia Wilayah Kaltim	
2	Ika Ayuningtyas	Statistisi Ahli Madya	BPS Provinsi Kalimantan Timur	
3	Ayat Nur Hidayat	Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur	
4			Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur	

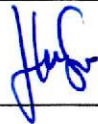
Unsur Akademisi

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
1			Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman	
2			Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Balikpapan	
3			Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepala Masyarakat UINSI Samarinda	

Unsur Asosiasi/Dunia Usaha

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	TandaTangan
1			Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kaltim	
2			Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Timur	
3			Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kalimantan Timur	
4			Ikatan Ahli Perencana (IAP) Kaltim	
5			Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Kaltim	
6			Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Kaltim	
7			Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kaltim	
8			Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Kaltim	

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
9			Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Kaltim	
10			Himpunan Pramuwisata Indonesia Kaltim	
11			Komite Ekonomi Kreatif Kaltim	
12			Komite Daerah Ekonomi Syariah Kaltim	
13	Adung Karyo Sedio Utomo	Sekretaris	Himpunan Pengusaha Domba dan Kambing Indoensia Kaltim (HPDKI)	
14			Perhimpunan Inshan Perunggasan Rakyat (PINSAR)	
15			Gabungan Pelaku dan Pemerhati Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (GAPENSISKA)	
16	Kholid S	Ketua Bidang	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kaltim	
17			Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
18			PT. Kaltim Melati Bakti Satya	
19	Hasrun Jaya	Sekretaris	Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Kaltim	
20			Adipati Nusantara (Asosiasi UMKM)	
21	Jumri	Sekretaris	Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Kaltim (DEKOPINWIL)	

FORMAT LAMPIRAN II
PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 – 2029

Tujuan 1, Terwujudnya Kaltim Sukses,
 Sasaran 1, Akselerasi Perekonomian Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET	
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			Tahun 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov, Kaltim					98.618.880.000		75.722.500.000		135.262.500.000		172.153.750.000		43.540.000.000			
1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru (jenis)	28	38	2.500.000.000	43	2.550.000.000	48	2.600.000.000	53	2.650.000.000	58	2.700.000.000	Business Matching, Msi Dagang, fasilitasi promosi produk	Outcome kinerja dipilih karena lebih menceminkan program prioritas peningkatan ekspor non migas non batu bara Kaltim dan lebih tepat pada tupoksi bidang perdagangan	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM Menjaln Kemitraan dan Ekspor (%)	24,5	28	1.800.000.000	31,5	2.000.000.000	35	2.200.000.000	38,5	2.400.000.000	42	2.600.000.000	-fasilitasi UKM potensial Ekspor	Dim PP 7 Th 2021 ttg kemudahan berusaha, Data UKM Kaltim: 326 (omset 2 15 M) UKM Ekspor 2024: 80 UKM	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha (%)	4,86	8,86	25.150.000.000	10,86	26.300.000.000	12,86	21.500.000.000	14,86	21.300.000.000	16,86	1.500.000.000	-Pemberdayaan Kewirausahaan Terpadu "JOSPOL KALTIM PRENEUR"	Sistem SIDT kemenkopUKM Tahun 2024 jml UKM: 72.000 Penambahan 2% setiap tahun	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	50	60	1.250.000.000	65	1.375.000.000	70	1.512.500.000	75	1.663.750.000	80	2.100.000.000	- Pendataan Koperasi - Fasilitasi Koperasi	Hasil pemeriksaan koperasi adalah menilai koperasi berkualitas/ Tidak Jumlah koperasi Prov 2024: 160 koperasi	
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	37,82	47	67.918.880.000	52	43.497.500.000	57	107.450.000.000	62	167.840.000.000	67	34.640.000.000	- Pengembangan Kawasan Industri - Pembangunan Rumah Produksi Bersama	Tahun 2024 realisasi investasi sektor industr: 27,81 T Tahun 2024 Target investasi sektor industr : 73,54 T	
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	1,06	1,06	1.398.000.000	1,06	878.951.087	1,06	966.846.196	1,06	1.063.530.816	1,06	1.169.883.898	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persentase semakin kecil semakin stabil harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, karena semakin kecil ketergantungan dengan daerah lain	
2. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov, Kaltim					9.269.100.453		14.339.361.911		14.807.045.359		15.067.393.070		15.767.147.140			
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi tanaman pangan (%)	4,89	1,18	250.000.000	1,18	5.200.000.000	1,18	5.200.000.000	1,18	5.300.000.000	1,18	5.500.000.000	1).Penyediaan Sarana Pertanian Tanaman Pangan, 2).Gerakan Tanam/Panen, 3).Koordinasi dan Sinkronisasi 4).Monitoring dan Evaluasi,		
		Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (%)	12,33	7,00	7.519.100.453	9,25	7.639.361.911	11,00	8.107.045.359	11,75	8.267.393.070	12,35	8.767.147.140	1).Penyediaan Sarana Pertanian Hortikultura, 2).Sarana Pascapanen, 3).Sarana Pengolahan, 4).Data Produksi Hortikultura, 5).Registrasi Kebun Hortk 6).Monitoring dan Evaluasi,		
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Ha)	10.195,06	16.415,06	1.500.000.000	21.415,06	1.500.000.000	30.462,06	1.500.000.000	42.462,06	1.500.000.000	42.462,06	1.500.000.000	Perda / Perbup LP2B Kab/Kota		
3	PROGRAM PENYULUH PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusa Pertanian yang Meningkat Kapastasiya (%)	77,00	78,00	1.296.865.590	78,50	1.394.638.580	79,00	1.394.638.580	79,50	1.394.638.580	80,00	1.394.638.580	1).Pelatihan Teknis Pertanian, 2).Bimbingan Teknis Pertanian,		
3. Dinas Perkebunan Prov, Kaltim					17.097.004.856		19.551.893.730		21.544.467.753		23.766.629.479		26.271.007.317			
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)	19.829.215	20.004.096		20.092.114		20.180.519		20.180.519		20.358.499		Peningkatan produksi komoditas tanaman perkebunan		
		Persentase Kelompok tani yang Memanfaatkan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan(%)	n/a	16,67	15.853.350.076	33,33	19.174.990.230	50	21.167.564.253	66,67	23.389.725.979	83,33	25.894.103.817			
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun (Ha)	52.381	44.525	1.243.654.780	40.450	376.903.500	36.750	376.903.500	33.400	376.903.500	30.050	376.903.500	Peningkatan Luasan Areal Perkebunan		
		Persentase Pemanfaatan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Kelompok Tani (%)	n/a	12		24		48		72		100		Peningkatan pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani		

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			Tahun 2026
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)	9,69	30,35	2.998.929.120,00	47,76	2.708.701.026,00	65,17	2.605.071.128,00	82,59	2.738.578.241,00	100	2.895.436.065,00	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Perkebunan	
		Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat (%)	26,5	40,59		55,45		70,3		85,15		100		Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pekebun	
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim				41.810.780.987		44.823.745.314		48.606.201.716		52.709.570.166		55.084.543.512			
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi (Skor)	80,66	85,57	15.561.280.987	88,14	16.873.745.314	90,78	18.481.201.716	93,51	20.409.470.166	96,31	20.534.543.512	1)Pengadaan Temak Sapi 2)Pengadaan Temak Kambing/Domba 3)Paket Usaha Unggas Lokal 4)Paket Usaha Unggas Ayam Petelur Luas HPT Unggul	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan (Skor)	94,81	95,76	2.300.000.000	96,24	11.300.000.000	96,72	3.300.000.000	97,20	2.300.000.000	97,69	1.800.000.000	Luas Kawasan peruntukan peternakan	
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular strategis/AKH (skor)	91,25	94,97	9.250.000.000	95,47	10.200.000.000	95,97	11.150.000.000	96,47	12.100.100.000	96,97	13.125.000.000	1)Jumlah wilayah terkendali 2)Jumlah pelayanan kesehatan hewan 3)Check poin 4)Lab keswan dan kesmavet	
		Tingkat pengendalian kesehatan veteriner (skor)	87,54	91,08	6.749.500.000	92,90	7.450.000.000	94,76	8.125.000.000	96,65	8.800.000.000	98,58	9.475.000.000	*wilayah tidak ada peningkatan kasus GHPR *sapi betina yang dpotong di RPH yang telah mendapatkan SKSR/AMPM yang sesuai standar *produk pangan segar asal hewan yang diperiksa dan dinyatakan memenuhi persyaratan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) *Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat NKV atau Sertifikat Pra-NKV	
4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan (skor)	75,83	82,02	10.250.000.000	85,30	10.300.000.000	88,71	10.850.000.000	92,26	11.400.000.000	95,95	11.950.000.000	1) Unit usaha yang menerapkan sistem integrasi 2) Jumlah peternak dilatih 3) Pembentukan desa koperasi temak 4) Intervensi infalasi/deflasi	
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim				1287402000		1072000000		1199000000		1324000000		1456400000			
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	214.694,0	223.367,8	3.835.000.000	227.834,9	4.150.000.000,0	232.391,7	4.560.000.000,0	237.039,5	4.910.000.000,0	241.780,3	8.012.400.000	1. Bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan; 2. Peningkatan sarana dan prasarana di 6 PPI 3. Penerbitan izin kapal	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	241.728,4	258.945,5	8.950.158.964	268.008,6	9.173.912.937	277.388,9	9.347.304.738	287.097,5	9.580.987.357	297.145,9	13.511.710.000	1)Bantuan sarana dan prasarana pembudidaya ikan. 2)Bimtek, pelatihan, sosialisasi teknis perikanan budidaya. 3)Pengembangan inovasi dan teknologi perikanan budidaya 4)Pembinaan sertifikasi CPB, CBIB dan monitoring penyakit ikan.	
3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan hasil perikanan (ton)	139.937,00	154.233,40	1287402000	161.882,80	1072000000	169.977,00	1199000000	178.475,90	1324000000	1.877.399,70	1456400000	Perikanan, Promosi dan sosialisasi konsumsi ikan (Gemerakan dan PMT-AS)	
		Nilai produk olahan hasil perikanan (Rp)	4.987.154	5.803.184.818		6.152.768.866		6.531.188.803		6.978.126.009		7.495.987.647			

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			Tahun 2026
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
6, Dinas Kehutanan Prov, Kaltim				32.312.366.700		92.936.666.886		92.936.666.886		92.936.666.886		92.936.666.886			
1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi Hasil Hutan Kayu	6.293.432.95	6.402.024.00	47.478.300.186	6.461.888,27	47.478.300.186	6.525.929.11	47.478.300.186	6.594.146.54	47.478.300.186	6.665.844,44	47.478.300.186	- Pemantauan tutupan lahan --> Persentase Tutupan Lahan - Sosialisasi batas kawasan hutan --> Kegiatan Sosialisasi Batas Kawasan	
		Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1.545	1645	458.366.700	1695	458.366.700	1745	458.366.700	1795	458.366.700	1845	458.366.700	- Pemantauan tutupan lahan --> Persentase Tutupan Lahan - Sosialisasi batas kawasan hutan --> Kegiatan Sosialisasi Batas Kawasan - Data dan informasi mitigasi perubahan iklim --> Data Mitigasi Perubahan Iklim - Pembinaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan --> Pembinaan terhadap PPBH	
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	1500000000	3250000000	31854000000	3.500.000.000	45000000000	#####	45000000000	4.000.000.000	45000000000	4.250.000.000	45000000000	- Pengumpulan data NTE kelompok kehutanan secara berkala. - Pengembangan sistem informasi berbasis digital untuk memantau perkembangan usaha kelompok.	
7, Dinas Pariwisata Prov, Kaltim				22.625.000.000		24.050.000.000		24.475.000.000		24.900.000.000		25.325.000.000			
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	1,69	2,19	8.625.000.000	2,69	9.050.000.000	3,19	9.475.000.000	4,01	9.900.000.000	4,51	10.325.000.000	Penyediaan Sarpras Destinasi Pariwisata Provinsi Kaltim secara kuantitas dan kualitas sehingga menambah jumlah kunjungan wisatawan	Data Jumlah Sarpras Destinasi Pariwisata Provinsi Kaltim yang dibangun/direhab (Pemeliharaan/Rehab/Pengadaan)
2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	3,55	5,07	14.000.000.000	6,08	15.000.000.000	7,09	15.000.000.000	8,11	15.000.000.000	9,12	15.000.000.000	1, Peningkatan kualitas produk dan karya pelaku ekraf 2, Pelaku ekraf bersertifikat HKI 3, Peningkatan jumlah pasar melalui aktivasi ruang kreasi dan event pameran dan pertunjukan	Data jumlah pelaku yang terus bertambah diperkirakan 1,650 (seribu enam ratus lima puluh) Kegiatan aktivasi ekraf bertambah melalui event pameran dan pertunjukan unggulan
8, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov, Kaltim				15.049.753.304		14.999.979.715		15.712.535.686		17.055.447.254		19.300.000.000			
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pelaku Usaha yang melakukan investasi besar (di atas 10 M) (Pelaku Usaha)	N/A	9	5.062.420.000	11	3.812.420.000	13	3.962.420.000	15	4.412.420.000	17	5.800.000.000	1. Penyusunan RUMPD Kaltim 2. Penyusunan Kajian Peta Potensi Investasi Kaltim 3. Pendampingan fasilitasi hilirisasi investasi strategis	
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi (%)	N/A	2	3.592.268.904	2	3.535.559.715	2	3.889.115.686	2	4.278.027.254	3	4.500.000.000	1. Pameran investasi dalam & luar negeri 2. Forum investasi (MIF, One on One Meeting) 3. Publikasi Promosi Digital	
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan (Nilai IKM)	93	93,25	6.395.064.400	93,58	7.652.000.000	93,91	7.861.000.000	94,25	8.365.000.000	94,6	9.000.000.000	1. Penyediaan pelayanan perizinan melalui aplikasi OSS dan e-ptsp 2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan perizinan pelaku usaha 3. Pemantauan lapangan pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha dan non perizinan	
9, BRIDA Prov, Kaltim				0		0		0		0		0			
1	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Ditindaklanjuti (%)	65	67		70		70		72		73		Penelitian dan Pengembangan : Publikasi Ilmiah Kegiatan Riset	
10. Biro Perekonomian Setda Prov, Kaltim				0		0		0		0		0			
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang di fasilitasi	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian yang Mendorong Ekonomi yang berkualitas	1)Pemantauan Harga 2)Pemanfaatan data Harga dan Pealporan 3)Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah/Operasi Pasar
		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian	90 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			

FORMAT LAMPIRAN III
PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 – 2029

Tujuan 1, Terwujudnya Kaltim Sukses,
 Sasaran 1, Akselerasi Perekonomian Daerah

No	Program	Indikator Program	Data Capaian pada Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Output Utama	Ket Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kaltim			223.242.771.403		172.465.008.485		155.085.434.772		126.552.970.027		117.520.275.633			
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	44	60	1.010.000.000	60	1.515.000.000	80	2.272.500.000	90	3.408.750.000	100	3.908.750.000	- Pengawasan da Pemerksaan Koperasi Provinsi - Pengawasan Koperasi simpan pinjam	Jumlah koperasi setiap tahun bertambah Jumlah koperasi Prov 2024: 160 koperasi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	50	60	1.250.000.000	65	1.375.000.000	70	1.512.500.000	75	1.663.750.000	80	2.100.000.000	- Pendataan Koperasi - Fasilitas Koperasi	Hasil pemeriksaan koperasi adalah menilai koperasi berkualitas/ Tidak Jumlah koperasi Prov 2024: 160 koperasi
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Wtrausaha (%)	4,86	8,86	25.150.000.000	10,86	26.300.000.000	12,86	21.500.000.000	14,86	21.300.000.000	16,86	1.500.000.000	- Pemberdayaan Kewirausahaan Terpadu "JOSPOL KALTIM PRENEUR"	Sistem SIDT kemenkopUKM Tahun 2024 jml UKM: 72.000 Penambahan 2% setiap tahun
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMMK	Proporsi UKM Menjalni Kemitraan dan Ekspor (%)	24,5	28	1.800.000.000	31,5	2.000.000.000	35	2.200.000.000	38,5	2.400.000.000	42	2.600.000.000	- fasilitas UKM potensial Ekspor	Dim PP 7 Th 2021 ttg kemudahan berusaha, Data UKM Kaltim: 326 (onset 2-15 M) UKM Ekspor 2024: 80 UKM
5	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	100	100	731.789.120	100	804.968.032	100	885.464.835	100	974.011.318	100	1.071.412.449	- Pelaku ekspor yang menggunakan SKA	Fasilitasi SKA dan rekomendasi minuman beralkohol
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	21,4	57,1	25.000.000.000	71,5	50.000.000.000	85,7	30.000.000.000	92,84	1.000.000.000	100	1.000.000.000	- Pembangunan Pusat Distribusi Pangan	Kegiatan : Pembangunan 1 Pusat Distribusi Pangan yg rencana beroperasi lh 2027 Tahun 2026 Pembangunan PDP dg usulan anggaran 17 M yg terdiri dari CAS (Controlled Atmosphere Storage), Gudang basah, Gudang kering dan kantor pengelola.
7	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	1,06	1,06	1.398.000.000	1,06	878.951.087	1,06	966.846.196	1,06	1.063.530.816	1,06	1.169.883.898	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persentase semakin kecil semakin stabil harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, karena semakin kecil ketergantungan dengan daerah lain
8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru (jenis)	28	38	2.500.000.000	43	2.550.000.000	48	2.600.000.000	53	2.650.000.000	58	2.700.000.000	Business Matching, Misi Dagang, fasilitas promosi produk	Outcome kinerja dipilih karena lebih mencerminkan program prioritas peningkatan ekspor non migas non batu bara Kaltim dan lebih tepat pada tupoksi bidang perdagangan
9	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	100	100	4.763.323.821	100	5.001.490.012	100	5.251.564.512	100	5.429.507.281	100	5.789.849.875	- Pengawasan Barang dan Jasa - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen - Sosialisasi Konsumen Cerdas	Tahun 2024: 13 pengaduan, seluruhnya sdh ditindak lanjuti
10	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	75	80	1.150.380.000	83,3	1.454.079.384	86,6	1.757.778.768	91,6	2.061.478.152	100	2.365.177.536	- Monev Kerjasama antar daerah ke pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran - Fasilitas promosi produk UKM	Jumlah produk UMKM binaan yg masuk pasar 2024: 45 Jumlah produk UMKM yang dibina 2024 : 60
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase realisasi investasi sektor industri dan Kawasan industri (%)		47	67.918.880.000	52	43.497.500.000	57	107.450.000.000	62	167.840.000.000	67	34.640.000.000	- Pengembangan Kawasan Industri - Pembangunan Rumah Produksi Bersama	Tahun 2024 realisasi investasi sektor industri: 27,81 T Tahun 2024 Target investasi sektor industri : 73,54 T
12	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100	100	1.400.000.000	100	1.440.000.000	100	1.480.000.000	100	1.520.000.000	100	1.520.000.000	- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan IUI, IPUJ, IUKI, IPKI kewenangan Provinsi	Melakukan verifikasi teknis perizinan industri besar PMDN (bukan industri strategis), IKM lintas Kab/Kota Tahun 2023 yang masuk: 8 KBLI ind besar izin yg terbit tahun 2023 : 8 KBLI Disperindagkop hanya memberi rekomendasi, sdgkan yang menerbitkan izin adalah DPMTSP

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi secara lengkap, akurat dan terkini (%)	40,32	56,44	1.000.000.000	64,5	1.060.000.000	72,56	1.120.000.000	80,62	1.180.000.000	88,68	1.180.000.000	-diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri provinsi melalui SINas	Tahun 2023 terdapat Perusahaan industri yang menyampaikan Laporan sebanyak 642 perusahaan Tahun 2024 terdapat Perusahaan industri yang menyampaikan Laporan sebanyak 901 perusahaan
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88,5	89	74.236.313.322	89	75.254.469.982	89	78.681.704.973	89	89.922.557.460	89	85.500.000.000	layanan kesekretariatan pengembangan kompetensi pegawai pemenuhan sarana dan prasarana kantor penganggaran pelaporan	
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100					
	UPTD BPSMB														
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD BPSMB)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88,5	89	2.868.687.364	89	2945540000	89	2.935.340.000	89	3.407.340.000	89	3.534.000.000	layanan kesekretariatan pengembangan kompetensi pegawai pemenuhan sarana dan prasarana kantor penganggaran pelaporan	
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100					
16	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)	- Mutu layanan UPTD BPSMB - Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	(A) 95,43 73,21	(A)95,53 74,21	3.016.000.000	95,58 74,71	3016000000	95,58 75,21	3.048.300.000	(A)95,68 75,71	3.017.045.000	(A)95,73 75,71	3.121.051.750	- layanan sertifikasi dan kalibrasi - Pengujian Komoditi Potensial	-BPSMB telah memiliki standar pelayanan (SP), berdasarkan hasil survey layanan ada beberapa kategori hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): A.Sangat Baik (88,31-100,00) B.Baik (76,61-88,30) C.Kurang Baik (65,00-76,60) D.Tidak Baik (25,00-64,99) - Perhitungan dilakukan dengan menguji sampel/komoditi potensial yang dilakukan oleh petugas. IKK yang mendekati angka 100 menunjukkan produk dari komoditi potensial yang ada di pasaran telah memenuhi ketentuan standar yang ditetapkan.
	UPTD PELATIHAN KOPERASI														
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD Pelatihan Koperasi)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88,5	89	6.099.397.776	89	6421000000	89	6.625.000.000	89	6.805.000.000	89	7000000000	layanan kesekretariatan pengembangan kompetensi pegawai pemenuhan sarana dan prasarana kantor penganggaran	
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100					
18	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN (UPTD Pelatihan Koperasi)	Persentase Koperasi dan UKM yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	2	3	1.950.000.000	3,5	2.150.000.000	4	2.300.000.000	4,5	2.450.000.000	5	2550000000	- Fasilitas pelatihan bagi Koperasi dan UKM	Data 2024: Jml koperasi aktif: 2.900 Jml UKM: 72.000 Jml koperasi dan UKM yg dilatih s/d 2024 : 1.511
2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim					106.074.435.841		118.349.509.226		127.878.217.246		134.775.986.778		144.068.507.491		
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi (Skor)	80,66	85,57	15.561.280.987	88,14	16.873.745.314	90,78	18.481.201.716	93,51	20.409.470.166	96,31	20.534.543.512	1)Pengadaan Ternak Sapi 2)Pengadaan Ternak Kambing/Domba 3)Paket Usaha Unggas Lokal 4)Paket Usaha Unggas Ayam Petelur 5) Luas HPT Unggul	
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Kawasan dan agribisnis (Skor)	87,02	90,54	3.000.000.000	92,35	3.000.000.000	94,19	3.000.000.000	96,08	3.000.000.000	98,00	3.000.000.000		
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hewan Pakan Ternak (Skor)	81,02	85,95	3.680.000.000	88,53	4.085.000.000	91,18	4.270.000.000	93,92	5.050.000.000	96,74	5.190.000.000	*Populasi Ternak/Hewan Yang dilakukan Perawatan *Sapi yang telah mendapatkan Surat Keterangan Layak Bibit *Produksi Bibit/Benh HPT Yang Terdistribusi *Produksi Hewan Pakan Ternak dan pakan olahan	

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan (Skor)	94,81	95,76	2.300.000.000	96,24	11.300.000.000	96,72	3.300.000.000	97,20	2.300.000.000	97,69	1.800.000.000	Luas Kawasan peruntukan peternakan	
2	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular strategis/AKH (skor)	91,25	94,97	9.250.000.000	95,47	10.200.000.000	95,97	11.150.000.000	96,47	12.100.100.000	96,97	13.125.000.000	1)Jumlah wilayah terkendali 2)Jumlah pelayanan kesehatan hewan 3)Check poin 4)Lab keswan dan kesmavet	
		Tingkat pengendalian kesehatan veteriner (skor)	87,54	91,08	6.749.500.000	92,90	7.450.000.000	94,76	8.125.000.000	96,65	8.800.000.000	98,58	9.475.000.000	*wilayah tidak ada peningkatan kasus GHPR *sapi betina yang dipotong di RPH yang telah mendapatkan SKSR/AMPM yang sesuai standar *produk pangan segar asal hewan yang diperiksa dan dinyatakan memenuhi persyaratan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) *Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat NKV atau Sertifikat Pra-NKV	
		Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (skor)	93,35	94,28	3.000.000.000	94,75	4.000.000.000	95,23	4.600.000.000	95,70	4.600.000.000	96,18	5.500.000.000	*Alat Lab yang dikalibrasi tepat waktu *Penurunan kesalahan hasil uji *Sertifikat hasil uji lab yang tepat waktu	
3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan (skor)	75,83	82,02	10.250.000.000	85,30	10.300.000.000	88,71	10.850.000.000	92,26	11.400.000.000	95,95	11.950.000.000	1) Unit usaha yang menerapkan sistem integrasi 2) Jumlah peternak dilatih 3) Pembentukan desa koperasi temak 4) Intervensi infeksi/defesi	
4	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan (skor)	83,59	86,96	600.000.000	88,70	600.000.000	90,48	600.000.000	92,28	600.000.000	94,13	600.000.000	PKS sektor peternakan sesuai dengan regulasi yang berlaku	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan) (Indeks)	91,65	92,57	41.624.106.403	93,03	45.623.786.604	93,50	49.849.939.357	93,56	54.470.615.107	94,43	59.113.696.368	Kepuasan pengguna layanan terhadap berbagai aspek layanan kesekretariatan	
		Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan) (%)	100	100		100		100		100		Keluhan pengguna layanan yang diterima dan telah diproses dan diberikan respons atau solusi (tindak lanjut)			
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Lab Keswan & Kesmavet) (Indeks)	91,65	92,57	4.163.548.451	93,03	5.012.977.308	93,50	6.229.076.173	93,56	6.398.801.505	94,43	7.080.267.611	Kepuasan pengguna layanan terhadap berbagai aspek layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Lab Keswan & Kesmavet) (%)	100	100		100		100		100		Keluhan pengguna layanan yang diterima dan telah diproses dan diberikan respons atau solusi (tindak lanjut)			
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PTHPT) (Indeks)	91,65	92,57	8.196.000.000	93,03	11.204.000.000	93,50	10.723.000.000	93,56	7.947.000.000	94,43	8.500.000.000	Kepuasan pengguna layanan terhadap berbagai aspek layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PTHPT) (%)	100	100		100		100		100		Keluhan pengguna layanan yang diterima dan telah diproses dan diberikan respons atau solusi (tindak lanjut)			
3. Dinas Perkebunan Prov. Kaltim					91.420.538.829		88.112.257.171		93.303.720.955		99.728.567.494		102.626.637.079		
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)	19.829.215	20.004.096	15.853.350.076	20.092.114	19.174.990.230	20.180.519	21.167.564.253	20.180.519	23.389.725.979	20.358.499	25.894.103.817	Peningkatan produksi komoditas tanaman perkebunan	
		Persentase Kelompok tani yang Memanfaatkan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan(%)	n/a	16,67		33,33		50		66,67		83,33		Peningkatan pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (benih)	12.460.941	8.000.000	1.497.548.748	8.000.000	1.777.303.708	8.000.000	2.395.034.089	8.000.000	2.093.464.249	8.000.000	1.931.010.674	Peningkatan pengawasan peredaran benih perkebunan	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	Persentase produksi Benih Tanaman Perkebunan Unggul dan Bermutu yang diproduksi oleh UPTD (%)	n/a	3,32	4.700.000.000	3,45	4.900.000.000	3,58	5.100.000.000	3,71	5.300.000.000	3,83	5.500.000.000	Pemenuhan ketersediaan benih tanaman perkebunan unggul dan bermutu	

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun (Ha)	52.381	44.525	1.243.654.780	40.450	376.903.500	36.750	376.903.500	33.400	376.903.500	30.050	376.903.500	Peningkatan Luasan Areal Perkebunan	
		Persentase Pemanfaatan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Kelompok Tani (%)	n/a	12		24		48		72		100		Peningkatan pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani	
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)	9,69	30,35	2.998.929.120,00	47,76	2.708.701.026,00	65,17	2.605.071.128,00	82,59	2.738.578.241,00	100	2.895.436.065,00	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Perkebunan	
		Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat (%)	26,5	40,59		55,45		70,3		85,15		100		Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pekebun	
6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perkebunan besar berizin usaha yang terbina dan terawasi (%)	n/a	33,05	3.398.203.798	49,64	3.327.854.014	66,19	3.337.954.707	83,09	3.347.487.815	100	3.410.487.815	Peningkatan Pembinaan, Pengawasan Pembangunan, dan Kemitraan Usaha Perkebunan	
		Persentase Pelaku Usaha Perkebunan yang Bersertifikasi Berkelanjutan (%)	18,38	19,62		20,58		21,54		22,5		23,46		Meningkatnya pelaku usaha Perkebunan yang Bersertifikasi Berkelanjutan	
7	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (%)	90,62	90	1.245.013.210	90	1.369.514.531	90	1.506.465.984	90	1.657.112.582	90	1.739.968.211	Pengendalian Penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada Tanaman Perkebunan	
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Perkebunan (%)	n/a	100	4.940.068.743	100	5.790.678.179	100	6.669.978.179	100	9.387.876.295	100	11.160.648.135	Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada Area Perkebunan	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (Dinas Perkebunan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	95,77	95,09	38.160.073.674	95,21	39.304.875.884	95,33	40.484.022.160	95,42	41.698.542.825	95,51	42.949.499.110	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		Penanganan keluhan pengguna layanan	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PBP)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	98,1	97	1.745.074.000	97,3	1.832.327.700	97,6	1.923.944.085	97,9	2.020.141.289	97,9	2.121.148.354	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		Penanganan keluhan pengguna layanan	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD P2TP)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	97,8	95	1.822.937.800	95	1.914.084.690	95	2.009.788.925	95	2.110.278.371	95	2.215.792.289	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		Penanganan keluhan pengguna layanan	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PBTP)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	97,4	97,5	16.814.614.000	97,8	8.343.724.735	97,8	8.332.065.073	98	8.347.034.589	98	5.327.075.174	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Perkebunan) (%)	100	100		100		100		100		100		Penanganan keluhan pengguna layanan	

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Kaltim				25.464.451.739		26.818.029.216		27.293.670.978		27.931.727.058		28.985.247.333		
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%)	372,73	100		100		100		100		100			
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi (skor)	89,10	89,95	1.676.918.602	90,40	1.677.930.656	90,85	1.680.940.000	91,31	1.682.150.000	91,77	1.686.165.000	1) Sosialisasi, Edukasi, dan Advokasi B2SA di Sekolah, Kampus, dan Pesantren di 10 Kab/Kota. 2) Rumah Pangan B2SA di 10 Kab/Kota. 3) Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Pengolahan Pangan Lokal.	
		Skor PPH Ketersediaan (skor)	97,70	97,80	819.321.963	97,85	840.000.000	97,90	840.000.000	97,95	870.000.000	98,00	870.000.000	1) Gerakan Pangan Murah. 2)Rapat Pengendalian Inflasi. 3) Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan. 4) Pertemuan Evaluasi Harga Pangan. 5) Rapat Penyusunan NBM. 6)Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan. 7) Sosialisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan	
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	3,81	1,90	1.705.909.112	0,95	1.745.000.000	-	1.745.000.000	-	1.765.000.000	-	1.765.000.000	1) Rapat FSVA. 2) Penyusunan FSVA. 3) Koordinasi Pelaksanaan Pengelbaian dan Penyaluran Cadangan Pangan. 4) Sosialisasi/Promosi/Edukasi Gerakan Selamatkan Pangan. 5) Penyusunan SKPG	
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	78,20	87		87		87		87		87			
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi tanaman pangan (%)	4,89	1,18	250.000.000	1,18	5.200.000.000	1,18	5.200.000.000	1,18	5.300.000.000	1,18	5.500.000.000	1) Penyediaan Sarana Pertanian Tanaman Pangan. 2) Gerakan TanamPanen. 3) Koordinasi dan Sinkronisasi 4) Monitoring dan Evaluasi.	
		Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (%)	12,33	7,00	7.519.100.453	9,25	7.639.361.911	11,00	8.107.045.359	11,75	8.267.393.070	12,35	8.767.147.140	1) Penyediaan Sarana Pertanian Hortikultura. 2) Sarana Pascapanen. 3) Sarana Pengolahan. 4) Data Produksi Hortikultura. 5) Registrasi Kebun Hortik 6) Montoring dan Evaluasi.	
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (UPTD BBI TPH)	Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura (%)	48	53	1.289.017.817	55	1.417.919.599	60	1.559.711.558	65	1.715.682.714	70	1.887.250.986	Perbanyak benih sumber hortikultura	
		Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan (%)	36,31	100	741.381.922	100	815.520.114	100	897.072.125	100	986.779.338	100	1.085.457.271	Perbanyak Benih Sumber Tanaman Pangan	
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (UPTD PSBTPH)	Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi (%)	98	100	5.120.314.425	100	1.655.356.501	100	1.390.281.501	100	1.424.421.501	100	1.457.246.501	Sertifikasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (UPTD PTPH)	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk (%)	37	50		55		60		65		70			
9	Program Penyediaan dan Pengembangan Pasarana Pertanian	Cakupan Regulasi LP2B yang ditetapkan	4	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	-	1.500.000.000	Perda / Perbup LP2B Kab/Kota	
10	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rasio luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat dtangani terhadap luas serangan OPT (%)	74,5	90	3.545.621.855	90	2.932.301.855	90	2.978.981.855	90	3.025.661.855	90	3.072.341.855	1) Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2) Kaj Terap Teknologi Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura. 3) Surveillance OPT. 4) Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura.	
11	Program Penyuluhan Pertanian (UPTD BPSPDMP)	Persentase Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian yang dtingkatkan (%)	77,00	78,00	1.296.865.590	78,50	1.394.638.580	79,00	1.394.638.580	79,50	1.394.638.580	80,00	1.394.638.580	1) Pelatihan Teknis Pertanian. 2)Bimbingan Teknis Pertanian.	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (DPTPH) (Indeks)	81,58	82,80	68.652.458.136	83,6	68.805.458.112	84,4	69.305.458.112	85,2	69.800.458.002	86	70.111.458.112	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (DPTPH) (%)	100	100	1.509.274.537	100	1.603.225.481	100	1.740.415.481	100	1.788.415.481	100	1.788.415.481	Penanganan keluhan pengguna layanan	
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BBI TPH) (Indeks)	82	82,8	3.202.166.670	83,6	3.312.554.670	84,4	3.412.554.670	85,2	3.412.554.670	86	3.554.988.231	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BBI TPH) (%)	100	100	699.538.323	100	730.538.323	100	782.538.323	100	782.538.323	100	823.447.323	Penanganan keluhan pengguna layanan	

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPPSDMP) (Indeks)	81,58	82,8	3.399.004.379	83,6	3.470.004.442	84,4	3.570.004.442	85,2	3.570.004.442	86	3.666.935.442	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BPPSDMP) (%)	100	100	429.589.446	100	470.558.661	100	520.558.661	100	520.558.661	100	570.558.661	Penanganan keluhan pengguna layanan	
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSBTPH) (Indeks)	81,58	82,8	1.461.691.242	83,6	1.539.288.000	84,4	1.324.600.000	85,2	1.297.600.000	86	1.605.600.000	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PSBTPH) (%)	100	100	407.534.332	100	443.850.000	100	465.100.000	100	493.700.000	100	509.200.000	Penanganan keluhan pengguna layanan	
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PTPH) (Indeks)	81,58	82,8	3.387.716.051	83,6	3.405.525.051	84,4	3.480.665.849	85,2	3.480.665.849	86	3.530.443.521	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PTPH) (%)	100	100	847.350.170	100	899.421.170	100	939.651.170	100	939.651.170	100	989.651.170	Penanganan keluhan pengguna layanan	
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim					0		0		0		0		0		
1	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (%)	72,97	85,71	4.615.516.124	87,36	5.195.000.000	87,37	5.715.490.000	87,38	6.287.039.000	87,40	6.915.770.000	- Penataan Ruang Laut Kaltim berdasarkan Peraturan Daerah tentang RTWP Kaltim yang ditetapkan - Pengelbalaan Kawasan Konservasi Perairan berdasarkan Penetapan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang efektif - Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecd, - Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecd, terbentuknya Kolompok Penggiat Konservasi dan peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat Pesisir	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecd Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitar (KKP3KKD(PS))	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (%)	n/a	100,0		100,0	1.889.151.582	100,0	2.060.056.518	100,0	2.295.932.974	100,0	2.525.560.000		
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	214.694,0	223.367,8	3.835.000.000	227.834,9	4.150.000.000,0	232.391,7	4.560.000.000,0	237.039,5	4.910.000.000,0	241.780,3	8.012.400.000	Bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan -Peningkatan sarana dan prasarana di 6 PPI -Penerbitan izin kapal	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP (UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru)	Jumlah Pendaratan Hasil Perikanan di Pelabuhan Perikanan (Ton)	561,0	583,7		595,3		607,2		619,4		631,8	]		
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	241.728,4	258.945,5	8.950.158.964	268.008,6	9.173.912.937	277.388,9	9.347.304.738	287.097,5	9.580.987.357	297.145,9	13.511.710.000	Bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan. -Bmtek, pelatihan, soslasasi teknis perikanan budidaya. -Pengembangan inovasi dan teknobgi perikanan budidaya -Pembinaan sertifikasi CPiB, CBiB dan monitoring penyakit ikan	
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar)	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (Ekor)	1.000.000.000	1.100.000.000	2.306.921.432	1.200.000.000	2.364.594.468	1.300.000.000	2.423.709.329	1.400.000.000	2.484.302.063	1.500.000.000	3.850.000.000		
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (UPTD SPAPAL Muara Badak-Sebulu)	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar (Ekor)	4.181.000	4.732.250	3.574.128.378	4.840.750	3.500.000.000	4.949.250	3.540.000.000	5.057.750	3.640.000.000	5.166.250	4.004.000.000		
8	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	100	100	3.395.771.880	100	2.196.466.203	100	2.251.377.858	100	2.307.662.305	100	2.416.150.000	-Meningkatnya kesadaran dan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan penundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. -Berkurangnya pelanggaran ilegal fishing dan perusakan lingkungan -Terdokumentasinya kepatuhan melalui laporan pengawasan, catatan perizinan yang valid, dan pemenuhan standar operasional	

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
9	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan hasil perikanan (ton)	139.937,0	154.233,4	1.287.402.000	161.882,8	1.072.000.000	169.977,0	1.199.000.000	178.475,9	1.324.000.000	187.399,7	1.456.400.000	Diversifikasi Produk Olahan Perikanan, Promosi dan sosialisasi konsumsi ikan (Gemarkan dan PMT-AS) Diversifikasi Produk Olahan Perikanan, Promosi dan sosialisasi konsumsi ikan (Gemarkan dan PMT-AS)	
		Nlai produk olahan hasil perikanan (Rp)	4.987.154.743	5.803.184.818		6.152.768.866		6.531.188.803		6.978.126.009		7.495.987.647			
10	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (UPTD PMHP)	Persentase hasil uj produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan (%)	70	83	439.723.208	86	246.360.021	90	252.519.022	94	258.831.997	98	284.720.000		
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85	92,4	50.642.283.312	92,6	75.563.968.000	92,8	85.670.715.900	93	96.764.056.695	93,2	98.540.490.000	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 4 dokumen berupa : DPA, RKA, RENJA, LKUIP Proses APBD Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berupa : 1. Pembayaran gaji dan tunjangan 2. Pembayaran honor pengebola keuangan 3. Pelaksanaan kegiatan kepegawaian	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	88,7	100		100		100		100		100		Melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85	92,4	943.023.830	92,6	966.599.426	92,8	990.764.411	93	1.015.533.522	93,2	1.117.100.000		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	88,7	100	1.519.027.525	100	1.557.003.213	100	1.595.928.293	100	1.635.826.501	100	1.799.450.000		
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD SPAPAL Muara Badak-Sebelu)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85	92,4	4.090.933.111	92,6	3.960.490.000	92,8	4.097.570.000	93	4.017.570.000	93,2	4.419.360.000		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	88,7	100	902.907.814	100	1.277.671.000	100	1.178.471.000	100	1.278.471.000	100	1.351.150.000		
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD PMHP)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85	92,4	850.184.740	92,6	749.755.198	92,8	766.762.078	93	784.194.130	93,2	837.770.000		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	88,7	100	512.985.323	100	573.172.456	100	587.501.767	100	602.189.312	100	662.440.000		
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	n/a	92,4		92,6	2.890.370.500	92,8	3.649.296.013	93	3.202.861.288	93,2	354.297.000		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	n/a	100		100	1.548.476.796		1.607.188.695	100	1.668.368.338	100	1.835.240.000		
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Kecil Kepulauan Derawan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	n/a	92,4		92,6	577.078.076		707.983.012	93	844.579.468	93,2	929.050.000		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	n/a	100		100	334.676.150		334.676.150	100	334.676.150,0	100	368.160.000		
6,	Dinas Kehutanan Prov. Kaltim				511.973.995.346		585.148.295.532		598.398.295.532		609.148.295.532		618.398.295.532		
1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi Hasil Hutan Kayu	6.293.432,95	6.402.024,00	47.478.300.186	6.461.888,27	47.478.300.186	6.525.929,11	47.478.300.186	6.594.146,54	47.478.300.186	6.665.844,44	47.478.300.186		
		2, Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1.545	1645	458.366.700	1695	458.366.700	1745	458.366.700	1795	458.366.700	1845	458.366.700		
		3, Jumlah unit pengebola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	1	3	2.000.000.000	4	3.000.000.000	5	4.000.000.000	6	5.000.000.000	7	6.000.000.000		
		4, Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	3,5	4,45	95.000.000.000	4,92	100.000.000.000	5,4	105.000.000.000	5,87	110.000.000.000	6,34	115.000.000.000		
		5, Persentase luas kerusakan kawasan hutan di luar Hutan Konservasi	0,16	<1	41.000.000.000	<1	41.000.000.000	<1	41.000.000.000	<1	41.000.000.000	<1	41.000.000.000		
2	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1, Indeks Pengebolan Keanekaragaman Hayati	N/A	0,54	4.200.000.000	547	5.000.000.000	555	5.500.000.000	562	6.000.000.000	569	6.500.000.000		
		2, Luas kawasan dengan ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan	N/A	95337	11.500.000.000	109140	12.500.000.000	115860	13.500.000.000	122580	14.500.000.000	132580	15.500.000.000		

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	1500000000	3250000000	31854000000	3.500.000.000	45000000000	37.500.000.000	45000000000	4.000.000.000	45000000000	4.250.000.000	45000000000		
		2. Luas kawasan yang dikelola masyarakat	330184	370184	5.125.000.000	380184	5.375.000.000	390184	5.625.000.000	400184	5.875.000.000	410184	6.125.000.000		
		3. Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	1	3	1.500.000.000	4	3.000.000.000	5	3.000.000.000	6	4.500.000.000	7	4.500.000.000		
		4. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	10	12	37.500.000.000	12	39.000.000.000	15	43.000.000.000	15	43.000.000.000	15	43.000.000.000		
4	PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1. Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	19886	574628	4.000.000.000	767815	5.500.000.000	843695	7.000.000.000	948076	8.500.000.000	1286457	10.000.000.000		
		2. Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,47	9.000.000.000	0,7	9.500.000.000	0,93	10.000.000.000	1,17	10.500.000.000	1,4	11.000.000.000		
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	273.966.483.378	86,53	273.966.483.378	87,22	273.966.483.378	87,92	273.966.483.378	88,63	273.966.483.378		
		Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	3.870.145.268	100	3.870.145.268	100	3.870.145.268	100	3.870.145.268	100	3.870.145.268		
7. Dinas Pariwisata Prov. Kaltim					58.425.780.129		60.820.899.003		65.705.200.800		67.270.708.824		69.350.882.089		
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1,69	2,69	8.625.000.000	3,19	9.050.000.000	4,01	9.475.000.000	4,51	9.900.000.000	5	10.325.000.000		
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	28,56	29,1	7.350.000.000	29,74	7.700.000.000	30,13	9.000.000.000	30,68	9.450.000.000	31,09	12.650.000.000		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	3,55	5,07	14.000.000.000	6,08	15.000.000.000	7,09	15.000.000.000	8,11	15.000.000.000	9,12	15.000.000.000		
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	0,82	1,08	6.000.000.000	1,1	6.500.000.000	1,2	7.000.000.000	1,3	8.000.000.000	1,4	8.500.000.000		
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	82	22.450.780.129	83	22.570.899.003	84	25.230.200.800	85	24.920.708.824	85	22.875.882.089		
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100					
8. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim					80.474.341.319		61.763.780.698		62.832.197.026		64.825.334.987		69.374.832.409		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pelaku Usaha yang melakukan investasi besar (di atas 10 M) (Pelaku Usaha)	N/A	9	5.062.420.000	11	3.812.420.000	13	3.962.420.000	15	4.412.420.000	17	5.800.000.000	1. Penyusunan RUMPD Kaltim 2. Penyusunan Kajian Peta Potensi Investasi Kaltim 3. Pendampingan fasilitasi hirisan investasi strategis	
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi (%)	N/A	2	3.592.268.904	2	3.535.559.715	2	3.889.115.686	2	4.278.027.254	3	4.500.000.000	1. Pameran investasi dalam & luar negeri 2. Forum investasi (MIF, One on One Meeting) 3. Publikasi Promosi Digital	
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan (Nilai IKM)	93	93,25	6.395.064.400	93,58	7.652.000.000	93,91	7.861.000.000	94,25	8.365.000.000	94,6	9.000.000.000	1. Penyediaan pelayanan perizinan melalui aplikasi OSS dan e-ptsp 2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan perizinan pelaku usaha 3. Pemantauan lapangan pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha dan non perizinan	
4	PROGRAM KERJASAMA PENANAMAN MODAL	Jumlah Kerjasama Penanaman Modal yang difasilitasi (Dokumen)	N/A	2	850.000.000	2	885.000.000	2	923.500.000	2	965.850.000	2	1.012.435.000	Pengembangan Kerjasama Intas sektoral (RIRU, BIMP-EAGA)	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan PMPTSP yang Memanfaatkan Sistem Informasi (%)	64	82	1.200.000.300	86	1.400.000.000	91	1.300.000.000	95	1.550.000.000	96	1.650.000.000	Fasilitasi penyediaan data informasi PMPTSP ke publik	
6	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha (%)	100	100	2.999.100.513	100	2.521.603.574	100	2.678.763.931	100	2.841.640.324	100	3.000.000.000	1. Pengawasan pelaporan LKPM Pelaku Usaha 2. Press realese nilai investasi Kaltim 3. Fasilitasi pendampingan dan penyelesaian permasalahan pelaporan LKPM	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	92	60.375.487.202	93	41.957.197.409	94	42.217.397.409	95	42.412.397.409	97	44.412.397.409		
9. BRIDA Prov. Kaltim					0		0		0		0		0		
1	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Ditindaklanjuti (%)	65	67		70		70		72		73			
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim					0		0		0		0		0		
1	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Tenaga Kerja yang Dimagangkan dan Bekerja (%)	65	67		70		70,50		75		80			
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	27,10	28,10		28,60		29		29,60		30			

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026		
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029				Tahun 2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
11. Biro Perekonomian Setda Prov. Kaltim					0		0		0		0		0		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BIRO PEREKONOMIAN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatian Biro Perekonomian	81 Indeks	83 Indeks		84 Indeks		85 Indeks		86 Indeks		87 Indeks		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatian Biro Perekonomian	1)Pementauan Harga 2)Pemanfaatan data Harga dan Peaporan 3)Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah/Operasi Pasar
	2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang di fasilitasi	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian yang Mendorong Ekonomi yang berkualitas
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian			90 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			
12. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prov Kaltim					3.383.072.190.881		4.652.146.273.611		4.558.807.093.539		3.765.011.113.919		2.700.979.161.349		
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ruas jalan baru yang dibangun (Ruas)	2	2	419.000.000.000	5	995.000.000.000	5	995.000.000.000	5	1.017.000.000.000	5	645.000.000.000	1. Pembangunan Jalan Tering - Ujoh Blang 2. Pembangunan Jalan Long Bagun Seberang - Long Boh (Batas Kaltara) 3. Pembangunan Jalan Akses Jembatan Nibung - Smp. Km. 46 4. Pembangunan Waterfront and Riverside Road (Seli - Jembatan Mahkota II) 5. Pembangunan Jalan Sumbu IKN / Sotek - Bongana	
		Rasio Kementapan Jalan Provinsi (%)	83,77	90,77	1.132.000.000.000	100	1.140.000.000.000	100	500.000.000.000	100	500.000.000.000	100	500.000.000.000	1. Rekonstruksi Jalan Smp. 4 Kalarang - Bts. Berau 2. Rekonstruksi Jalan Bts. Kutim - Talsayan 3. Rekonstruksi Talsayan - Tanjung Redeb 4. Rekonstruksi Muara Badak - Bts. Bontang 5. Rekonstruksi Jalan Lainnya Menuju Kementapan 100%	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Daerah Irigasi Kewenangan provinsi yang terlayani/jaringan irigasi (Ha)	1.822	135	61.896.420.383	130	84.070.115.305	161	68.418.667.459	176	76.420.083.039	176	88.485.680.469	DI Betan; DI Marangkayu; DI Labanan; DI Merancang; DI Kalarang; DI Selangkau; DI Rantau Pulung; DI Bengalon; DIR Sebulu; DIR Tabalar Muara; DIR Rantau Pangan; DIR Sukan Tengah; DIR Tanjung Perengat; DIR Unutang; DIR Sei Kuran; DIR Sullivan ; DIR Laburan Lama; DIR Padang Pangrapat; DIR Riwang; DIR Tanjung Aru; DIR Tanjung Harapan; DIR Resak; DIR Datah Blang	
		Panjang pantai kritis yang ditangani (Km)	0,52	1,41	42.612.742.500	1,31	32.641.004.500	1,14	138.288.254.500	1,49	108.897.442.500	1,49	31.897.442.500	Pantai Manggar; Pantai Lameru; Pantai Bontang; Pantai Mako Bimob; Pantai Tanjung Juma; Pantai Sabolang; Pantai Teluk Suleman; Pantai Maratua; Pantai Kenyamukan; Pantai Sekerat; Pantai Manubar; Pantai Kaniungan Besar	
		Kapasitas air baku untuk air bersih (Lt/dt)	875	260	159.700.000.000	60	156.200.000.000	60	121.200.000.000	60	91.500.000.000	60	91.500.000.000	Pemb. Sumur Dalam 10 Kab/Kota Pembangunan Unit Air Baku 10 Kab/Kota Pembangunan Bendung Sungai Sangatta	
		Penanganan luas genangan banjir perkotaan (Ha)	147	131	62.241.977.680	169	305.341.977.680	170	309.241.977.680	149	301.441.977.680	137	70.741.977.680	Sungai Karang Murus; Sungai Karang Asam Besar ; Sungai Karang Asam Kedi ; Sungai Bontang; Sungai Guntung; Sungai Tumbit; Sungai Makroman; Sungai Sambutan; Sungai Loa Janan; Sungai Tenggarong; Sungai Marangkayu; Sungai Mangkujang; Sungai Bukuan; Sungai Empat; Sungai Sangatta; Sungai di Teluk Pandan; Sungai Kenyamukan; Sungai Loa Haur; Sungai Labangka; Sungai Kendilo; Sungai Sesulu; Sungai Mahakam (Kubarj); Sungai Mahakam (Mahulu)	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani (%)	10,8	22,13	19.800.000.000	33,45	19.250.000.000	44,75	20.350.000.000	56,96	19.800.000.000	68,38	19.800.000.000	Pembangunan & Peningkatan Kespasas Drainase Utame 10 Kab/Kota	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Air Minum Regional (%)	23,4	36,5	111.854.029.600	48,7	309.230.920.000	73,4	1.055.789.727.000	90,3	945.729.630.000	100	691.971.540.000	1. SPAM REGIONAL LONG KALI 2. SPAM REGIONAL MAHAKAM 3. SPAM REGIONAL MARANGKAYU	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Air Limbah Domestik Regional (%)	10,2	15,6	4.115.938.640	24,5	61.586.847.900	38,9	21.586.847.900	67,8	201.986.847.900	90	201.486.847.900	1. SPALD REGIONAL SAMARINDA-KUKAR	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani (%)	13,5	30	1.055.496.147.200	50,56	1.209.769.504.026	71,75	999.625.027.200	87,41	172.978.197.200	100	75.555.299.200	1. RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM (MAJOR) 2. GEDUNG KOMPLEK PERKANTORAN KALTIM EX TEMINDUNG (MAJOR) 3. GEDUNG KESWAN-KESMAVET KALTIM 4. KANTOR DINAS KESEHATAN KALTIM 5. KANTOR DINAS PERKEBUNAN KALTIM 6. KANTOR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KALTIM (EX BARISTAN) 7. KANTOR DINAS ESDM KALTIM 8. KANTOR BPBD KALTIM 9. GREEN BUILDING DINAS PUPR-PERA KALTIM 10. KANTOR DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KALTIM 11. KANTOR DINAS KEHUTANAN KALTIM 12. KANTOR BPSPDM KALTIM 13. KANTOR UPTD BPSPDM PERTANIAN KALTIM 14. KANTOR BIRO UMUM - GEDUNG PKK KALTIM	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Persampahan Regional (%)	5,4	9,2	1,403,853,740,00	15,5	1,559,200,000,00	31,3	20,400,000,000,00	67,6	52,790,000,000,00	90	67,790,000,000,00	1. TPA REGIONAL SAMARINDA-KUKAR (LOA JANAN ATAU TENGGARONG SEBERANG)	

[illegible]

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13.	Dinas Perhubungan Prov Kaltim				74.299.655.651		277.000.135.433		170.187.701.363		172.055.596.363		158.302.181.363		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	70	76	29.023.782.060	78,3	28.955.705.538	78,7	29.205.705.538	79,07	28.955.705.538	79,44	29.055.705.538		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	4.901.966.380	100	6.625.606.025	100	5.583.995.825	100	5.780.890.825	100	6.052.475.825		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi (Kejadian)	175	155	10.692.384.016	145	71.140.823.870	135	71.120.000.000	125	79.105.000.000	115	85.980.000.000	1. Sosialisasi dan Evaluasi RAK LLAJ Prov. Kaltim 2. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perengkapan Jalan (LPJU, Rambu, RPPJ, Marka, Paku Marka, Pagar Pengaman, Deliniator, CCTV) 3. Forum LLAJ; 4. Penegakan Hukum ODOL; 5. Rampcheck Angkutan AKDP; 6. Penyediaan Layanan Sarana Angkutan Umum Massal; 7. Penyediaan Layanan Angkutan Perintis.	
		Jumlah distribusi penumpang melalui terminal tipe b (Orang)	365.326	435	2.163.977.800	450	68.814.000.000	470	15.714.000.000	485	15.182.000.000	500	4.682.000.000	"1. Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe B Paser 2. Pengadaan Pagar dan Penutupan Tebing Terminal Tipe B Bonlang 3. Revitalisasi Terminal Tipe B Sungai Kunjang 4. Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan dan Pagar Terminal Tipe B Sangatta 5. Rehabilitasi Terminal Tipe B Berau"	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah distribusi penumpang melalui pelebuhan kewenangan provinsi (Orang)	100.365	118	24.003.567.595	127	31.400.000.000	136	31.400.000.000	145	26.400.000.000	154	26.400.000.000	"1. Rehabilitasi Demaga Tereng, Kutai Barat; 2. DED Demaga Speed depan Klr Gubemur 3. Kajian Pengelolaan Air Sungai di Kalimantan Timur (Mahakam dan Segah) 4. Pembangunan Demaga Speedboat di Depan kantor Gubemur	
		Jumlah distribusi barang melalui pelebuhan kewenangan provinsi (Kg)	19.312	23,4		25,4		27,4		29,5		31,5			
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian (%)	40	55	1.350.000.000	65	1.250.000.000	75	1.450.000.000	85	1.450.000.000	95	1.450.000.000	"1. Study FS Jaringan Kereta Api Rule Samarinda - Tenggarong 2. Study Kelayakan KPBU Jaringan Kereta Api Rule Samarinda - Tenggarong 3. Study SID Jaringan Kereta Api Rule Samarinda - Tenggarong 4. Study LARAP Jaringan Kereta Api Rule Samarinda - Tenggarong 5. Study AMDAL Jaringan Kereta Api Rule Samarinda - Tenggarong"	
	UPTD Terminal														
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	70	76		78,3		78,7		79,07		79,44			
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi (Kejadian)													
		Jumlah distribusi penumpang melalui terminal tipe b (Orang)	365.326	435	2.163.977.800	450	68.814.000.000	470	15.714.000.000	485	15.182.000.000	500	4.682.000.000	"1. Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe B Paser 2. Pengadaan Pagar dan Penutupan Tebing Terminal Tipe B Bonlang 3. Revitalisasi Terminal Tipe B Sungai Kunjang 4. Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan dan Pagar Terminal Tipe B Sangatta 5. Rehabilitasi Terminal Tipe B Berau"	
14.	Dinas Sosial Prov Kaltim				0		0		0		0		0		
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	5000 orang	4500 orang		4500 orang		4000 orang		3500 orang		3500 orang			
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)	50%	60%		65%		70%		75%		80%			

[illegible]

FORMAT LAMPIRAN IV

SARAN DAN MASUKAN FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029

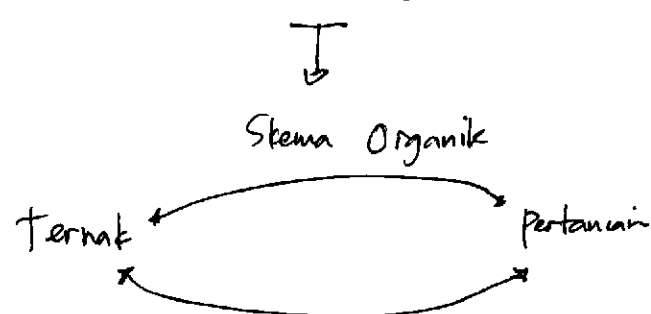
NAMA	INSTANSI	SARAN DAN MASUKAN
Sudarno	Tim Transisi	1. 2. 3. Terkait dengan tingkat inflasi penyumbang tersebar adalah pemasokan pangan, seharusnya terkait dengan pasokan pangan bisa lebih dijaga untuk standarisasi harganya. Perlu adanya peningkatan produksi dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Perlu dilakukan pertemuan dengan pemasok dalam mengendalikan harga pangan.
Zaini	Tim Transisi	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Perlu menyelaraskan program gratispoll dan jospol untuk masuk ke perencanaan daerah, dan memastikan Perangkat Daerah mendukung program gratispoll dan jospol yang sdh disusun. Kegiatan Perangkat Daerah dilingkup pertanian untuk Jospol 1 adalah mendukung hilirisasi, yang harus dipersiapkan adalah sisi hulunya yaitu dengan peningkatan produksi. Karena indikator kinerjanya adalah produktivitas. Meningkatkan produksi perlu 2 hal yng dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana pertanian dalam arti luas dan serta perluasan areal tanam, dimana untuk kegiatan Jospol belum ada memasukkan kegiatan tersebut, termasuk di dinas perkebunan tidak ada kegiatan untuk Jospol 1. Dinas perindustrian perlu melaksanakan kegiatan terkait bagaimana cara melakukan pengembangan Kawasan-kawasan industry Terkait dengan perikanan, untuk mendukung IBEI Berapa anggaran untuk peningkatan produksi ? jika bisa dioptimalkan sesuai dengan kewenangan provinsi. TIPD Untuk dapat di proyeksikan berapa persen kemampuan dalam mengendalikan Inflasi. BRIDA Perlu membuat Blue Print / Road Map untuk penelitian Daerah.
Anwar Saleh	Tim Transisi	1. 2. 8. Masalah batas kawasan hutan bisa smpai ke tingkat Tapak. Pengembangan hutan rakyat dipastikan untuk dapat terdaftar dan memperoleh bantuan dari pemerintah. pengelolaan DAS mahakam untuk transportasi publik perlu diperhatikan. dengan melakukan degradasi eks mahakam untuk mengurangi resiko bencana lingkungan
Ujang Rachmad	Asisten II	1. 2. 3. 4. Kegiatan untuk Peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis modern Tidak masuk ke dalam Jospol 1. Pastikan program dan kegiatan perkebunan untuk memasukkan kegiatan prioritasnya ke dalam jospol. Perangkat Daerah untuk dapat mengusulkan ke Bappeda yang masuk ke Jospol untuk kegiatan peningkatan Produksi. Asosiasi/mitra pembangunan dapat berkunjung ke Perangkat Daerah terkait untuk melakukan Forum diskusi khusus.

NAMA	INSTANSI	SARAN DAN MASUKAN
		- Perangkat daerah untuk dapat membuat usulan serta argumentasinya yang dimasukkan ke JOSPOL 1. - Perangkat daerah untuk Menyiapkan matriks usulan disertai anggaran. Dan disampaikan ke bappeda untuk dilakukan rapat koordinasi kembali membahas usulan tersebut.
Hasrun Jaya	GPEI	- keberlanjutan kualitas lahan Pertanian dan Perkebunan sebaiknya kita mulai mengarahkan kepada skema organik ramah lingkungan, selain untuk mendukung kualitas hidup Masyarakat dengan mengkonsumsi hasil pangan (Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan) yang sehat. - Potensi Kaltim adalah lahan yang tidak digunakan. disarankan lahan tersebut bisa dibudidayakan untuk pertanian dan perkebunan. - Perlu di kembangkan skema pertanian organik. - Perlu dibuat skema bagaimana kebutuhan pasar diluar negeri agar bisa terpenuhi dan bagaimana transformasi energi bisa dilaksanakan. - Perlu dipikirkan kembali terkait penangkapan ikan, karena banyak nelayan yang menangkap ikan diluar wilayah kaltim dikarenakan perairan di kaltim kritis. - Perdagangan Kaltim akan meningkat jika komoditi dan manufaktur dikembangkan selagi PAD disektor Batubara dan migas masih besar, sehingga sektor yang bisa mensuplay kebutuhan sektor lainyang sangat minim - Produksi ikan dan potensi laut (hewani) akan meningkat jika Pemerintah aktif membangun Infrastruktur rekayasa habitat ikan/udang dll dilaut akibat kerusakan terumbu karang (aktifitas alur pelayaran, metode tangkap illegal-bom, racun, pukat, dll) dan lemahnya pengawasan dan penanganan dari aparat terkait (Penegakan hukum)
Adung	HPDKI	- Di Kaltim kekurangan pasokan daging, blm adanya kawasan khusus peternakan serta tertinggalnya kelembagaan peternakan. - Ada Potensi peternakan domba untuk menggantikan komoditi Sapi. - Dilakukan evaluasi untuk komoditas sapi yang dijadikan major project oleh Dinas Peternakan apakah populasinya dari tahun ke tahun bertambah atau tidak. - Belum ada peraturan terkait perlindungan lahan peternakan. - Perlunya peningkatan SDM Peternakan yang di ikuti oleh keterjaminan penyerapan hasil. - Fokuskan pada pembangunan peternakan kawasan untuk komoditi yang lebih menyentuh langsung ke masyarakat
Jumri	DEKOPINWIL	- Mengenai inpres nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di harapkan masuk dalam Renstra dan Renja yang dilampirkan target pembangunan. - Koperasi indo memiliki dokumen bisa digunakan sebagai masukan untuk dokumen RPJMD
Fahmi	DPMPTSP	KEK maloy tidak ada cantolan sub kegiatan sehingga untuk pembangunannya akan dilakukan dimana? Karena

NAMA	INSTANSI	SARAN DAN MASUKAN
		adanya kawasan industri sangat berpengaruh dalam peningkatan LPE 2. Terkait Pariwisata untuk dapat lebih dikembangkan kembali untuk meningkatkan investasi
Warsito	Disprindakop	1. Intervensi untuk kawasan industri adalah kariangau, kegiatan 2026 ada kajian perpres untuk buluminung pengadaan lahan seluas 8 Ha 2. Kawasan Kariangau tahun 2027 penyusunan DED, Amdal, dan andalalin
Fitriansyah	BRIDA	Geopark menjadi program nasional sehingga kaltim harus bisa mengikuti dan sudah disiapkan calon geopark di kaltim.
Ika Ayu	BPS	1. Ekonomi kaltim tercatat sudah tinggi di posisi 8 PDRB Nasional 2. Perlu penambahan PDRB sebesar 50 T untuk bisa menambah pertumbuhan sampai 6% 3. Investasi kaltim saat ini yang mensupirt pertumbuhan ekonomi adalah IKN 4. Kaltim masih dominan di tambang. 5. Penurunan kontribusi tambang dikarenakan harga tambang yang turun. 6. Investasi di kaltim tinggi dipengaruhi oleh pembangunan di IKN
Daniel	IAP Kaltim	Perihal Belum ada kemantapan kesesuaian program utama antar OPD, yaitu korelasi kaltim sebagai lokasi nasional hirilisasi berbagai komoditi (kelapa sawit, Kelapa, rumput laut, nikel, timah, bauskit, tembaga) dengan pembangunan serta pengelolaan kawasan industri di Kaltim dan program insentif investasi di bidang-bidang tersebut (untuk Jospol 1 dan 2). Dan Juga perlu keselarasan lokasi industri, program pengurai penghambat pengembangan kawasan industri dan turunannya dengan kesesuaian ruang.
KTNA	KTNA Kaltim	1. Dalam paparan OPD Pertanian dan Perikanan belum ada Indikator Renstra perangkat Daerah dalam meningkatkan produktivitas 2. Perlunya inovasi dihulu dan dihilir untuk pembangunan sektor pertanian dan perikanan di Kaltim

FORMAT LAMPIRAN IV

SARAN DAN MASUKAN FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Nama	Instansi	Saran & Masukan
1	Hasrun Jaya	GPEI Kaltim	- Keberlanjutan kualitas lahan pertanian & perkebunan sebaiknya kita mulai mengarahkan kepada skema organik ramah lingkungan. Selain untuk mendukung kualitas hidup masyarakat dgn mengkonsumsi hasil pangan (pertanian, peternakan, perkebunan) yang sehat. "Sesungguhnya apapun tanah kita, jika tiap tahun diberi pupuk kimia, maka kualitas tanah kita akan sangat kritis"  <pre> graph TD subgraph Skema_Organik [Skema Organik] direction LR Ternak --> Pertanian Pertanian --> Ternak end </pre> - Best business ^{low} perdagangan Kaltim akan meningkat jika komoditas dan manufaktur dikembangkan, "mumpang" PAD di sektor batubara, migas masih besar sebagai sektor yang bisa mensuplai kebutuhan sektor lain yang sangat milih. - produksi ikan dan potensi laut (hewan). akan meningkat jika pemerintah aktif membangun infrastruktur rekayasa habitat ikan/udang dll dilaut akibat kerusakan Terumbu Karang (aktifitas Alur pelayaran, metode tangkap ilegal - Bom, Racun, pukat dll)

dan lemahnya pengawasan dan penanganan dari Aparat terkait. (kepastian hukum & penegakan hukum).

FORMAT LAMPIRAN IV

SARAN DAN MASUKAN FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Nama	Instansi	Saran & Masukan
1	JUMRI	DEKOPINWIL KALTIM	Untuk Rencana Strategis Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Kalimantan Timur dapat menjadi salah satu masukan untuk Penyempurnaan Rencana & Kerja Pembangunan Kalimantan Timur 2) Inpres no 9 tahun 2025 mengenai Pemberian Koperasi Manah Puri di kabupaten manah dalam Rencana & Kerja yg di kabupaten Tawee Kabupaten Bulungan yg ada, berakad dan Berkeadilan 3) Hasil-hasil meeting Subjalen yg tidak bisa Masyarakat Kalimantan Timur ini dapat diwujudkan. Karena tidak ada dari Masyarakat Kalimantan Timur 4) Perubahan Nilai Tukar Petani (NTP) Faktor Stoving → Pemasukan yg akan masuk bagi Masyarakat. F.S → Dang V.

FORMAT LAMPIRAN IV

SARAN DAN MASUKAN FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Nama	Instansi	Saran & Masukan
1	Adungks Utomo	HPDKI Kaltim	1. Fokuskan pd pembangunan peternakan kawasan untuk komoditi yg lebih mudah di bangunkan dan lebih me-nyantun langsung pd masyarakat. 2. Peningkatan sdm peternakan harus di barengi dg keterjiminan penyerapan hasil.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PARIWISATA

Jalan Jenderal Sudirman 22, Bugis, Samarinda Kota, Samarinda 75111

Telepon (0541) 736850

Laman <https://dispar.kaltimprov.go.id>; Pos-el disparkaltim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 900.1.1.2 / 034 / DISPAR/2025

TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.
- b. Bahwa karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran negara tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara nomor 4421);
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara nomor 4438);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Timur Dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berubah menjadi Dinas Pariwisata;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 15 tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2037;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
15. Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Mengangkat Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala,


Ririn Sari Dewi, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197304171999032007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 900.1.1.2 / / DISPAR – I, TANGGAL JANUARI 2025 TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS
PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pelindung : KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pengarah : 1. SEKRETARIS DINAS
2. KABID PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
3. KABID PENGEMBANGAN SDM DAN EKONOMI KREATIF
4. KABID DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
5. KABID PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Ketua : SUPRAYITNO, SST. PAR

Sekretaris : TITIEN AQUARITA A, S. E

Anggota : 1. NIKEN IRAWATI PUTRI, S.KOM
2. RIO WIDIHARTANTO, S.KOM
3. ADIB ASSEGGAFF
4. ANDI SUSAN DEWI FORTUNA, S. SOS
5. DENI ADRIAN, ST

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala,


Ririn Sari Dewi, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197304171999032007